



MERENTANKAN YANG RENTAN

KAJIAN AWAL TENTANG KONDISI PETANI KEDIRI
DALAM JERATAN RANTAI DISTRIBUSI PANGAN GLOBAL
SEMASA PANDEMI



FIAN Indonesia – 2020



MERENTANKAN YANG RENTAN

KAJIAN AWAL TENTANG KONDISI PETANI KEDIRI
DALAM JERATAN RANTAI DISTRIBUSI PANGAN GLOBAL
SEMASA PANDEMI

FIAN Indonesia - 2020



Disusun oleh:

Laksmi A. Savitri

Iwan Nurdin

Dian Pratiwi Pribadi

Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)

@fianindonesiajkppoxfam

Kata Pengantar

Pandemi covid 19 mewujud menjadi krisis kesehatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, mengglobal tanpa terkecuali. Walaupun dunia berpengalaman menghadapi peristiwa-peristiwa penyebaran wabah penyakit secara meluas sejak berabad lalu, namun kondisi hari ini menjadi kengerian baru karena diikuti oleh krisis-krisis lainnya, yang lalu membentuk rantai dampak hampir seperti tak berujung. Laiknya spiral, lingkaran-lingkaran efek yang makin mencekik rakyat miskin mulai dirasakan menguat di bidang ekonomi dan politik, terutama di pedesaan Indonesia.

Fian Indonesia bersama dengan Jaringan Global untuk Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia (Global Network for the Right to Food and Nutrition atau GNRTFN) telah mengidentifikasi beragam dampak yang muncul, termasuk respon pemerintah terhadap dampak-dampak tersebut. Salah satu kondisi krusial yang mengemuka adalah terguncangnya sistem pangan karena pengabaian pada beragam kendala yang melingkupi produsen pangan jauh sebelum pandemi muncul. Semisal masalah ketergantungan produsen pangan kecil pada industri pertanian dan agribisnis pangan yang menyebabkan nilai tukar petani di Indonesia selalu

rendah. Apa yang didapatkan oleh petani, terutama tanaman pangan, selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kondisi ini tidak pernah terkoreksi, maka sebagai akibatnya, bukan hanya kerentanan produsen pangan, tapi efek ini berantai sampai pada kejadian kematian karena kelaparan pada konsumen pangan perkotaan yang miskin dan kehilangan pekerjaan semasa pandemi. Di tengah situasi inilah, pemahaman tentang bagaimana rantai pasok pangan yang panjang karena perdagangan ekspor sesungguhnya mendudukkan posisi produsen pangan dan konsumennya, menjadi penting untuk diperiksa kembali.

Bekerjasama dengan JKPP dan Oxfam dalam kerangka menegakkan hak atas pangan, kajian ini dilaksanakan untuk mengisi informasi dan pemahaman baru tentang implikasi dari kondisi pandemi terhadap pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Tentu saja, gambar besar dari hulu ke hilir sistem pangan kita berperan secara politik, ekonomi dan budaya dalam menentukan keberlanjutan kehidupan yang berkeadilan. Pada titik itulah, kajian awal ini berusaha memberikan kontribusi.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Dewan Nasional FIAN Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Catatan Penting	ix
1. MENYOAL RANTAI PASOK GLOBAL DI MASA PANDEMI	1
Metodologi	6
2. STRUKTUR USAHA TANI KOMODITI BESAR: NANAS & JAGUNG ...	11
Usaha Tani Nanas	12
Usaha Tani Jagung	23
Pertanian Petani (Peasant's Farming) dalam Rantai Nilai Global	29
3. RANTAI PASOK KOMODITI EKSPOR DAN KERENTANAN PETANISEMASA PANDEMI COVID-19	33
4. KEBIJAKAN PERTANIAN/PANGAN DAN IMPLIKASINYA SEMASA PANDEMI COVID 19	43
5. EKSPOR PANGAN BERNILAI TINGGI DAN PANDEMI: MERENTANKAN YANG RENTAN	57
Daftar Pustaka	61



CATATAN PENTING

- A. RANTAI PASOK EKSPOR DIBENTUK OLEH USAHA TANI YANG DIKORPORATISASI DI HULU DAN HILIR
- B. RANTAI PASOK EKSPOR MEMPOSISIKAN BURUH TANI DAN USAHA KECIL SEBAGAI PIHAK YANG PALING RENTAN DI MASA PANDEMI KARENA STRUKTUR PASAR YANG MONOPSONI
- C. KEBIJAKAN PERTANIAN YANG MENDORONG EKSPOR HANYA DINIKMATI OLEH KORPORASI AGRIBISNIS YANG JUGA Menguasai PASAR DOMESTIK
- D. EBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN SEMASA PANDEMI TIDAK MENGINTERVENSI SECARA BERARTI DAYA TAHAN PETANI KECIL, KARENA PELUANG PASAR LOKAL, SKALA USAHA DAN JEJARING SOSIAL LEBIH Menguasai CARA-CARA PETANI DAN BURUH TANI UNTUK BERTAHAN HIDUP

1

MENYOAL RANTAI PASOK GLOBAL DI MASA PANDEMI

Sistem pangan atau seluruh faktor, aktor, relasi yang membentuk sistem pemenuhan produksi, konsumsi dan distribusi pangan di seluruh dunia sedang mengalami perubahan dalam tiga dasawarsa terakhir. Perubahan pola makan, perdagangan global, dan perubahan teknologi dalam industri pangan telah mendorong pertumbuhan ekspor-impor komoditi yang disebut sebagai komoditi pangan bernilai tinggi (*high-value food* atau HVF). Buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga potong adalah jenis komoditi yang dikatakan bernilai tinggi itu. Nilainya menjadi tinggi karena komoditi ini mudah rusak, sehingga harus memiliki standarisasi tertentu ketika dikirimkan dalam jarak jauh dan berhari-hari. Kondisi ini membuat HVF diperdagangkan melalui pasar khusus (Weinberger 2005).

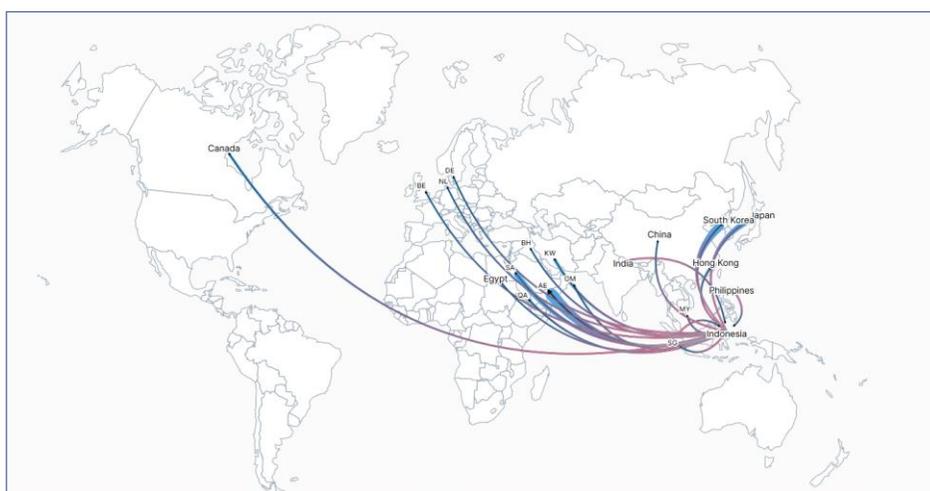
Jenis-jenis komoditi pangan bernilai tinggi baru berkembang sejak 1980-an, tapi langsung menduduki porsi 5% dari perdagangan global (Goodman et al 1997). Bahkan sejak 1972 Cina selalu menempati posisi teratas dalam ekspor buah-buahan dan sayuran dibandingkan negara-negara Asia Pasifik lainnya (Weinberger 2005). Perubahan tersebut juga dirasakan oleh Indonesia, karena pada awal 1990-an Indonesia dibanjiri oleh buah impor, seperti apel, anggur, pir, kiwi dan jeruk asal Kalifornia atau Australia. Sementara itu, struktur ekspor Indonesia pada masa itu masih didominasi oleh sektor migas, sehingga Indonesia sekedar menjadi sasaran empuk ekspor HVF dari negara-negara belahan Utara di kala konsumen kelas menengah-atas Indonesia mulai bermunculan.

Baru pada sepuluh tahun terakhir ini, ekspor buah-buahan dari Indonesia mulai bangkit. Buah-buahan tahunan seperti kelapa, manggis, nanas, dan sebagainya, pada 2012-2017 terus mengalami peningkatan, yaitu dari awalnya sebesar 291,5 ribu pada 2012 sampai 1 juta ton pada 2017, namun sedikit menurun pada 2018-2019 (BPS 2019). Negara tujuan utama ekspor buah-buahan tahunan pada 2019 adalah Vietnam, Malaysia, Tiongkok, India, dan Hongkong.

Salah satu komoditi yang cukup menggiurkan peluang ekspornya adalah nanas. Menurut Worldatlas.com, Indonesia menjadi produsen nanas terbesar ke-9 di dunia dengan produksi 1,39 juta ton per tahun. Buah ini sudah diekspor ke berbagai negara, antara lain: Korea Selatan, Spanyol, Arab Saudi, hingga Singapura dan Amerika Serikat (AS) (Gambar 1). Produksi buah nanas pun sudah mulai tersebar di beberapa sentra nanas di Indonesia, seperti: Kabupaten Subang, Pematang, Prabumulih, Kediri, Blitar, Kubu Raya, Mempawah, Muaro Jambi, Kampar, Lampung Tengah dan Karimun. Padahal dua-tiga dasawarsa yang lalu, produksi masif buah nanas baru terkonsentrasi di Lampung, di perkebunan yang dikuasai oleh Great Giant Pineapple, sebuah korporasi yang sudah berdiri sejak 1980-an dan saat ini menguasai 55% ekspor nanas Indonesia. Khusus untuk perdagangan nanas, neraca Indonesia dari tahun 2014-2019 menunjukkan surplus volume ekspor sampai dengan 43.750 ton¹.

¹ Data diolah dari statistik Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian (<http://hortikultura2.pertanian.go.id/produksi/>, diakses 5 September 2020)

Sementara di sektor komoditi pangan, juga terjadi kenaikan ekspor jagung secara drastis pada 2014 dan 2017², lalu angka ini melaju turun di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi jagung nasional pada 2017 mencapai 27,95 ribu ton, sementara tahun sebelumnya hanya 23,58 juta ton. Produksi jagung tersebut merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan diprediksi tumbuh 7,34% (Kementerian Pertanian, 2018). Sementara itu, pasar ekspor untuk jagung semakin terbuka luas, mulai dari permintaan untuk industri, pakan ternak, maupun ekspor benih jagung. Diperkirakan kecenderungan ekspor benih jagung akan terus meningkat di masa yang akan datang sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia di WTO yang mengikatnya untuk menyetujui perdagangan benih.



Gambar 1. Peta Tujuan Ekspor Nanas Indonesia³

Secara umum, dari tahun ke tahun ekspor produk pertanian Indonesia memang mengalami kenaikan, meskipun untuk beberapa komoditi kenaikan ini tidak secepat laju kenaikan impornya. Neraca perdagangan komoditi pangan kita kerap negatif. Guru Besar Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mencatat bahwa defisit neraca perdagangan komoditas pangan terus

² <https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=corn&graph=exports>, diakses 5 September 2020

³ Sumber: <https://www.tridge.com/intelligences/pineapple/ID>, diakses: 2 September 2020

melonjak sejak 2015 hingga 2017. Kenaikannya dari US\$ 9,9 juta menjadi US\$ 10,2 juta dan terus meningkat ke angka US\$ 10,8 juta⁴. Kondisi ini mengindikasikan dua hal, yaitu: (1) terjadinya perluasan pertanian komoditi ekspor dan semakin banyaknya petani yang memutuskan untuk mengintegrasikan diri pada perdagangan komoditi pangan bernilai tinggi, meskipun (2) seringkali komoditi yang diproduksinya tetap harus bersaing harga dengan komoditi impor; dan kedua hal tersebut disebabkan karena Indonesia menempatkan diri dalam rantai nilai global.

Sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia terhitung saat diumumkan oleh Presiden RI pada bulan Maret 2020, kondisi perdagangan komoditi pangan juga terimbas. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial karena pandemi telah mengakibatkan keterpurukan petani, terutama di daerah-daerah yang memproduksi pangan untuk ekspor, seperti di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Daerah pegunungan Kelud yang berada di Kab. Kediri adalah wilayah pertanian yang subur untuk pertanian sayur mayur, buah-buahan dan tanaman perkebunan. Tidak heran sejak era Belanda, tanah-tanah subur di wilayah ini selain dimanfaatkan oleh penduduk setempat, juga digunakan oleh perusahaan perkebunan seperti kopi, karet dan cengkeh.

Selama pandemi Covid 19 berkecamuk di Indonesia dan memasuki Provinsi Jawa Timur dengan laju penularan yang tinggi, terjadi berbagai kesulitan yang dialami oleh petani-petani yang selama ini menghasilkan panen untuk dipasok kepada pabrik pakan dan industri makanan multinasional di Jawa Timur, maupun ke pasar-pasar tradisional. Oleh karena Jawa Timur merupakan wilayah penghasil komoditi pangan bernilai tinggi yang ditanam oleh petani kecil, bukan korporasi multinasional, maka dampak covid 19 pun memukul petani kecil lebih keras. Kontribusi petani kecil sangat signifikan, misalnya: volume produksi nanas hasil keringat petani kecil dari Jawa Timur mengisi 7% dari total volume produksi, dan kedua terbesar di Indonesia. Peringkat pertama diduduki oleh produksi nanas dari Lampung yang sebagian besar dihasilkan oleh Great Giant Pineapple dan menguasai 35% dari total produksi Indonesia. Selain itu, komoditi jagung juga merupakan komoditi andalan petani kecil Jawa Timur. Secara keseluruhan Jawa Timur akan mengalami surplus produksi jagung

⁴ Reily, Michael. 2017. "Defisit Perdagangan Komoditas Pangan Mengkhawatirkan". Katadata.co.id. (<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55f64717f/lonjakan-impor-pangan-mulai-mengkhawatirkan>, diakses 2 September 2020)

sampai 1,6 juta ton pada 2020 dan Kediri menempati posisi penghasil produksi jagung ke-4 tertinggi di Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2017).

Produksi pertanian kelihatannya memang hampir tanpa masalah, tapi itu hanya pandangan jangka pendek. Sejumlah anomali awal seperti naiknya harga-harga hasil pertanian seperti jahe, kunyit di masa-masa awal pandemik dan menguntungkan petani tidak berlangsung lama. Sebab, pasokan kepada dunia industri dan pasar-pasar tradisional yang mengalami gangguan akibat PSBB telah membuat sejumlah harga pertanian mulai mengalami penurunan harga. Penurunan harga pangan bahkan terjadi secara global. Menurut *FAO Food Price Index* kondisi ini akan melanda setidaknya sepanjang tahun 2020 dengan beberapa pengecualian komoditi⁵. PSBB yang menyebabkan ditutupnya restoran dan beberapa industri berdampak pada pengurangan jumlah kerja dan pendapatan yang kemudian mengimbas pada rendahnya permintaan dan menjadikan volume pasokan berlebih. Inilah untaian sebab-akibat dari integrasi Indonesia pada rantai nilai global yang mendatangkan konsekuensi merugikan bagi petani kecil dan usaha kecil. Dengan demikian, persoalan bukan terletak pada rantai produksi, tetapi pada rantai distribusi dan konsumsi.

Di Kabupaten Kediri, tanaman yang banyak memasok untuk industri adalah jagung sebagai bahan pakan industri makanan dan ternak, cengkeh untuk industri tembakau, cabai untuk industri makanan, buah nanas untuk pasokan industri makanan dan konsumsi kota Surabaya dan Jakarta. Terjadinya berbagai masalah distribusi bahan hasil-hasil pertanian ini akan mengganggu serapan pasar dari tingkat produksi yang relatif stabil. Hal ini pun dirasakan oleh petani di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sebagian besar dari mereka menanam dengan pola yang berhutang biaya produksi sewaktu memulai menanam dan merawat tanaman dan dibayarkan saat panen. Bahkan sebelum pandemi, beberapa kajian tentang rantai pemasaran nanas di Kediri sudah menunjukkan bahwa petani nanas memiliki daya tawar yang lemah terhadap pedagang grosir, karena jumlah pedagang grosir yang sedikit hingga membuat mereka menjadi kelompok penentu harga (Rahayu 2018). Petani tidak mampu melakukan tawar-menawar karena masa panen nanas yang lama, sementara kebutuhan hidup terus menuntut untuk dipenuhi. Kajian Rahayu (2018) juga menunjukkan

⁵ FAO - News Article: Global food commodity prices drop further in April (<http://www.fao.org/news/story/en/item/1273914/icode/>, diakses 20 September 2020)

bahwa kondisi demikian menyebabkan banyak petani nanas yang harus menerima sistem ijon, yaitu pembelian nanas secara grosir di lahan sebelum masa panen.

Persoalan pandemi seperti pembatasan fisik, penutupan jalur disitribusi dan kejatuhan harga panen telah membuat sejumlah keluhan petani yang tidak dapat melakukan negosiasi utang ulang. Selain itu, turunnya kapasitas produksi pabrik-pabrik akibat pandemi juga telah memicu hasil pertanian petani tidak terserap dengan baik dan menurunkan harga hasil panen. Maka berangkat dari konteks ketergantungan petani pada rantai pasok yang panjang dalam rezim pangan global yang kapitalistik, serta kenyataan bahwa seni bertani ala petani kecil terus diuji dan dibenturkan pada struktur tersebut, kajian ini membahas tiga aspek pokok, yaitu: 1) struktur usaha tani kecil yang terinkorporasi pada relasi-relasi ekspor dan kondisi mereka ketika pandemi covid-19; 2) posisi kebijakan dalam mendukung usaha tani petani kecil dan pemenuhan haknya atas pangan dan gizi; dan 3) pembelajaran dari dampak pandemi dan globalisasi industri pangan terhadap pemenuhan hak atas pangan dan gizi petani produsen pangan.

METODOLOGI

Dalam perspektif ekonomi politik, Indonesia sebagai anggota WTO telah memposisikan diri menjadi bagian dari rezim pangan internasional dan diikat oleh kewajiban untuk terus berpartisipasi dalam perdagangan global. Rezim pangan internasional adalah sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam kapitalisme dunia sejak 1870-an (Friedmann & McMichael 1989; Bernstein 2019). Pada skala mikro, petani di lereng gunung Kelud yang memproduksi untuk ekspor adalah bagian penting dari kepastian terus berlangsungnya perdagangan global. Oleh sebab itu, disrupsi pada rantai pasok, bukan saja bisa berakibat secara lokal terhadap ketersediaan pangan, serta daya beli petani, tetapi juga akan menjadi ancaman bagi keseluruhan rantai marjin yang terbangun dari pasar pangan ekspor tersebut. Kondisi ini seperti dua sisi mata uang, satu sisi menunjukkan

pentingnya peran petani, tapi di sisi lain memperlihatkan betapa rentannya posisi mereka.

Petani dalam pandangan Van der Ploeg (2019) adalah mereka yang selalu diuji kemampuannya dalam menyeimbangkan banyak aspek dalam usaha tani, sehingga dalam kondisi krisis atau pun bukan, usaha tani menjadi seni bertahan hidup. Meski terdesak oleh berbagai himpitan, pertanian kecil ala petani tetap bertahan, bahkan telah banyak mengalami ragam pembaruan produksi, sehingga menggiring pada proses pembentukan atau kebangkitan kembali kaum tani. Salah satu seni bertani yang sedang menghadapi tantangan pada saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan tenaga kerja, produksi, dan harga, ketika serapan produksi mengalami penurunan drastis.

Dari perspektif hak, jika mengacu pada Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi dan Sosial Budaya (ICESCR 1966) hak atas pangan adalah hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat di bawah hukum internasional. Negara Indonesia mengemban kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas pangan dan gizi. Kegagalan negara untuk menjamin akses terhadap pangan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab dari kegagalan negara tersebut bisa disebabkan salah satunya oleh terblokirnya akses terhadap pangan atau bantuan pangan (diskriminasi) dan tidak adanya perlindungan atas kemungkinan kejadian kelaparan. Dengan demikian, hambatan atas rantai pasokan pangan terutama di tengah pandemi ini berpotensi untuk berakibat fatal pada ketidakberdayaan petani untuk memproduksi dan berujung pada kemungkinan kejadian kelaparan yang menimpa masyarakat luas.

Berlandaskan pada tiga konteks yang saling bertautan, yaitu: rezim pangan global, petani kecil dan hak atas pangan dan gizi, kajian ini menggunakan konsepsi rezim pangan (McMichael 2020), petani komoditi kecil-kecilan (Bernstein 2010) dan hak azasi manusia serta politik kebijakan sebagai kerangka analisa.

Sebagai upaya mendayagunakan pembacaan data melalui konsep-konsep di atas, karena kajian ini masih berupa kajian awal dan dilakukan di masa pandemi, banyak keterbatasan yang menyebabkan kedalaman analisa belum bisa optimal. Penyebabnya terutama karena proses pengambilan data terpaksa berjalan dalam banyak keterbatasan, baik keterbatasan waktu, mobilitas, maupun kontak langsung. Meskipun dalam rancangannya, kajian

ini dilakukan selama bulan Agustus-September 2020, namun pada praktiknya proses wawancara dan diskusi berkelompok hanya bisa dilakukan secara efektif selama dua minggu di bulan September. Sebagian besar aktivitas pengambilan data dilakukan secara temu-muka dengan mempraktikkan protokol kesehatan. Sejumlah narasumber dari kelompok petani, PPL, pengelola koperasi, pedagang ekspor dan pengepul yang berlokasi di Kecamatan Ngancar (sentra nanas) dan Kecamatan Puncu (produsen jagung) di Kabupaten Kediri telah sangat berjasa dalam memungkinkan berjalannya proses penelitian.

Garis Besar Isi

Laporan kajian awal mengenai dampak kondisi pandemi pada rantai pasok pertanian komoditi pangan di Kediri ini terbagi atas empat bagian. Bagian pertama akan memaparkan sruktur usaha tani nanas dan jagung yang terintegrasi dalam rantai pasok ekspor sebelum adanya pandemi. Pada bagian ini, usaha tani petani dijelaskan berdasarkan hubungan-hubungan produksi sekaligus skala usaha tani yang membentuknya, sampai dengan rantai distribusi tiap komoditi. Dari rantai distribusi nanas dan jagung ini kita bisa mengetahui bagaimana perdagangan ekspor terbentuk oleh munculnya korporasi-korporasi dan usaha perdagangan skala menengah (pengumpul, pengolah, grosir, kontraktor dan tengkulak).

Kondisi pandemi dan dampaknya pada produksi-distribusi nanas dan jagung dipaparkan pada bagian berikutnya. Pada bagian ini, keterpurukan produksi ekspor terlihat sangat mempengaruhi kondisi pendapatan petani, buruh tani dan usaha ekspor kecil/menengah, tapi korporasi tetap bergeming. Khususnya perusahaan benih jagung bertahan dengan sukses karena dua hal, yaitu: pasar domestik telah menyelamatkan volume pasokan dan kebijakan non-fiskal untuk kelancaran logistik mendukung serapan pasar ke luar bagi pasokan volume besar atau berskala korporasi agribisnis. Sementara di sisi petani produsen, usaha tani skala menengah dan besar menderita penurunan serapan pasar sampai dengan 30%-60%, baik karena serapan ekspor berkurang dan serapan pasar domestik pun menurun.

Kebijakan negara untuk mengintervensi kondisi rantai pasok yang terganggu oleh pandemi, ternyata hanya berada pada tataran wacana di tingkat nasional. Petani Kediri hanya merasakan sebagian bantuan sosial

yang diberikan secara umum, tapi skema spesifik untuk petani sama sekali tidak dirasakan. Sementara bantuan yang mendukung produksi tidak ada, penghasilan yang semakin menurun pun masih ditambah beban biaya pendidikan yang membengkak di luar kemampuan karena pembiayaan paket internet untuk sekolah daring.

Di bagian akhir, disimpulkan bahwa kondisi gangguan rantai pasok ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari integrasi petani kecil pada rezim pangan global. Kebijakan negara untuk memposisikan Indonesia dalam rantai nilai global melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas internasional, mau tidak mau dirasakan sebagai tamparan keras pada kemampuan bertahan hidup petani kecil dan buruh tani yang memproduksi komoditi ekspor. Alih-alih dukungan melalui intervensi kebijakan, nasib petani kecil dan buruh tani lebih ditentukan oleh sejauhmana mereka bisa memanfaatkan jejaring sosial, memenangkan pertarungan kompetitif di pasar lokal dan skala usaha yang fleksibel mengikuti serapan pasar.

2

STRUKTUR USAHA TANI KOMODITI EKSPOR: NANAS & JAGUNG

Laksmi A. Savitri

Pertanian nanas dan jagung sudah lama berkembang di Kediri. Kedua usaha ini bukan berawal dari adanya permintaan ekspor, tapi justru karena adanya pasar nasional yang mendorong produksi kedua komoditi ini. Bagi komoditi nanas, terbukanya pasar wisata dalam beberapa tahun terakhir telah membantu meruaknya penanaman nanas di wilayah pegunungan Kelud di Kediri. Sementara bagi komoditi jagung, kebijakan untuk swasembada jagung dan menutuo impor jagung telah memperbaiki harga di tingkat petani dan membuat usaha tani jagung menjadi lebih menarik.

Bagian ini akan menjelaskan serba-serbi usaha tani nanas dan jagung yang lalu berkembang menjadi komoditi ekspor. Menariknya adalah kedua komoditi ini memasuki rantai pasok ekspor yang berbeda. Komoditi nanas di Kediri mengalami komodifikasi ekspor di hilir sebagai produk olahan, sementara untuk jagung justru di hulu atau di bagian produksi

benih. Bagaimana struktur usaha tani ini kemudian terbentuk sebagai usaha perdagangan komoditi ekspor seiring rantai pasok yang terbentuk, akan dipaparkan berurutan dari usaha nanas, lalu usaha jagung, sebagaimana disampaikan berikut ini.

USAHA TANI NANAS

Beberapa waktu lalu mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa buah nanas segar yang dengan mudah kita dapatkan di pasar tradisional kini sudah menjadi komoditi yang dipajang di supermarket seantero benua. Salah satu pemasok nanas terbesar di Indonesia adalah Kabupaten Kediri. Petani nanas di Kecamatan Ngancar di Kabupaten Kediri bertani di bagian Timur lereng Kelud. Sejak 2016, penanaman nanas di Kecamatan Ngancar mulai intensif dan meluas. Pemkab Kediri mencatat bahwa setengah dari luas desa Sugihwaras ketika itu sudah dipenuhi oleh kebun nanas. Ada sekitar 150 hektar yang digarap oleh 7 kelompok tani. Saat panen tiba, satu hektar tanaman buah nanas bisa laku mencapai \pm 100 juta Rupiah. Nanas unggulan dari desa Sugihwaras adalah nanas lokal dan Smooth Cayenne yang kualitasnya sangat bagus (Gambar 2).



Gambar 2. Pertanian Nanas di desa Sugihwaras

Dibalik cerita sukses versi Pemkab beberapa tahun lalu itu, sesungguhnya ada beberapa persoalan yang melingkupi jatuh-bangunnya pertanian nanas, antara lain: banyak petani memiliki status penguasaan tanah yang rentan karena terancam berpindah-pindah tempat mengikuti daur hidup tegakan Perhutani dan ditekan oleh pungutan sewa ilegal, petani nanas terjerat dalam sistem ijon dan tebas, serta belum adanya pengolahan pasca panen yang mendapatkan pasar lokal atau nasional, sehingga kelebihan produksi mendatangkan musibah, bukan keuntungan. Masalah-masalah petani nanas Ngancar ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan memfokuskan pembahasan pada persoalan: tanah, tenaga kerja, permodalan, rantai input produksi dan rantai distribusi.

Tanah, Tenaga Kerja Dan Modal

Menurut penuturan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Kediri menjadi sentra nanas dengan memusatkan pertanian nanas seluas 7.665 hektar . Namun demikian, sebagian besar penguasaan tanah oleh petani nanas, termasuk di Kecamatan Ngancar, sangat terkait dengan keterbukaan Perhutani untuk memberikan akses dengan sistem lama magersaren atau skema baru Perhutanan Sosial. Dari hasil wawancara, jarang sekali petani Ngancar memiliki lahan sendiri, rata-rata menyewa atau bagi hasil dengan pihak lain. Besaran yang disewa atau bagi hasil oleh petani berkisar mulai dari tersempit 1 patok (800m²), 70 ru (980 m²); menengah 0,5 ha; terluas sampai dengan 15 ha. Petugas PPL Ngancar menyatakan bahwa hampir 40% dari luasan kebun nanas di Ngancar berada di lahan yang dikuasai Perhutani.

Penguasaan lahan yang luas biasanya ada di tangan pengepul atau pedagang besar yang mempekerjakan tenaga upahan. Selain itu, ada juga Koperasi Serba Usaha (KSU) Langgeng Mulyo di Ngancar yang masuk ke usaha tani nanas dengan menggunakan lahan Perhutani seluas 50 ha dan menerapkan bagi hasil 25% (Perhutani):75% (Koperasi). Pembagian hasil tersebut bahkan termasuk hasil kayu yang dipanen di lahan yang digunakan. Ketentuan yang digariskan oleh Perhutani adalah lahan yang bisa dipakai merupakan lahan yang sudah dipanen kayunya dan petani yang menggunakan lahan harus memelihara tegakan pohon yang berada di

lahannya dengan skema bagi hasil ketika tiba saatnya panen . Kerjasama koperasi dengan Perhutani dilakukan melalui LMDH Ngancar.

Meskipun kelihatannya pada kasus kerjasama Perhutani dengan koperasi, sistem bagi hasil berjalan dengan lancar, namun ketergantungan akses petani pada tanah yang dikuasai Perhutani ini bukan tanpa masalah. Meskipun tidak dialami langsung oleh petani Ngancar yang diwawancara, namun beberapa pemberitaan di media pada 8 Januari 2020 menyorot protes para petani terhadap korupsi yang dilakukan Perhutani. Menurut keterangan Mohammad Trijanto, wakil petani yang berdemonstrasi di depan kantor Perhutani KPH Kediri, petani di Kecamatan Puncu dikenai pungutan 3-4 juta jika ingin menggarap lahan. Bahkan dalam kurun waktu dua tahun pungutan bertambah menjadi 25-30 juta bagi petani yang ingin menggarap tanah kosong di kawasan Perhutani. Rata-rata petani di kecamatan ini menanam nanas, kentang, dan sayur-sayuran. Beberapa bukti kuitansi penarikan sewa illegal yang ditunjukkan oleh petani (Gambar 3) menjadi bukti bahwa sewa seakan resmi karena diberi cap.

Lebih jauh lagi, persoalan akses terhadap tanah juga menjadi semakin genting begitu sudah menyangkut sengketa tata batas antara hutan yang dikelola oleh warga dan hutan yang diklaim oleh Perhutani. Warga menuntut, karena keputusan pengakuan hutan masyarakat sudah ada, seharusnya segera dijalankan, sementara warga terus mengalami intimidasi. Kabardaerah.com mencatat warga yang melakukan demo ada sekitar 700 orang lebih berasal dari desa Asmorobangun, Satak, Wonorejo dan Manggis.

Meluasnya ketidakpuasan warga terjadi karena memang ada 18 desa yang sudah melakukan kerjasama untuk program perhutanan sosial, namun realisasinya tertunda karena menurut keterangan Administratur KPH Kediri, beberapa desa belum clear and clean batas wilayah administratifnya. Kondisi ini menyebabkan titik batas antara wilayah desa dan Perhutani dianggap belum jelas. Di sisi lain, program perhutanan sosial menjadi harapan warga karena mereka merasa diuntungkan oleh dua hal, yaitu: tidak harus pindah dan kehilangan kepastian akses terhadap tanah ketika Perhutani melakukan panen terhadap tegakan di mana lahan garapan berada, serta mendapatkan bagian keuntungan dari panen kayu di lahan pemegang izin perhutanan sosial. Tentu saja kondisi-kondisi yang menggantungkan kepastian akses masyarakat terhadap tanah ini

menunjukkan kerentanan yang tinggi petani nanas atas keberlangsungan usaha tani mereka.

Tanpa akses petani terhadap tanah yang berkepastian hukum, memang akses itu sendiri bisa menjadi komoditi yang diperjualbelikan di bawah tangan. Di Kecamatan Ngancar, misalnya, seorang petani yang mengelola 200 ribu pokok nanas di kawasan Perhutani mengakui bahwa ia bisa mengakses tanah di wilayah itu karena menyewa pada anggota LMDH yang memegang hak kelola dari Perhutani, tanpa mau menyebutkan angka sewa yang dibayarkannya. Padahal, jika memegang hak kelola seperti LMDH, Perhutani menerapkan bagi hasil dan 'kontrak' selama 35 tahun. Sebelum ada 'kontrak' perhutanan sosial, tiap musim tebang sengon lahan petani harus pindah, tapi dengan kontrak tersebut lahan menjadi tetap, meskipun sengon ditebang. Dalam kasus penyewaan oleh LMDH, hasil kayu jatuh ke tangan LMDH. Dengan begitu, kerentanan kepastian status hak atas tanah, bukan hanya mengancam keberlangsungan usaha tani petani penggarap yang selalu dibayangi oleh 'calo sewa tanah', tapi juga menjadikan sumber nafkah buruh tani berada di ujung tanduk.



Gambar 3. Kuitansi pembayaran sewa ilegal ke Perhutani

Rata-rata usaha tani nanas yang memiliki luasan 0,5 hektar atau lebih, hampir pasti mempekerjakan buruh tani. Petani dan pengepul yang menguasai lahan sampai 15 hektar, misalnya, bisa mempekerjakan 25-30 orang buruh tani. Upah buruh tani bila bekerja pagi hari selama 3 jam (pk 6-9) biasanya Rp 30 ribu, tapi kalau sampai tengah hari upahnya menjadi

Rp 45-50 ribu. Pada waktu tanam dan panen, biasanya petani penggarap/pemilik memilih untuk mempekerjakan secara borongan, yaitu Rp 60 ribu setiap 1000 bibit. Sementara jika panen, upah petik per 100 buah mencapai Rp 50 ribu. Pekerjaan-pekerjaan yang diupahkan juga termasuk pekerjaan merawat dan menyangi, tapi sangat tergantung dari jumlah tanaman nanas yang ditanam. Dengan demikian, kebun nanas menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup diharapkan oleh petani tanpa tanah. Ibu Kartini, seorang perempuan kepala keluarga yang biasa bekerja sebagai buruh tani, mengakui bahwa hampir setiap hari ia selalu mendapat permintaan kerja di kebun-kebun nanas tetangga. Pekerjaan itu bisa mencukupi kebutuhan kelaarganya sehari-hari. Demikian pula pak Ali Makrup yang merasa cukup mengantongi modal untuk tanam nanas seusai panen karena bekerja pagi di lahan sendiri dan sore di lahan petani lainnya, meskipun tetap harus menghemat pengeluaran dengan ketat.



Gambar 4. Usaha tani nanas dan tomat-cabai di bawah tegakan Perhutani

Menurut perhitungan seorang petani nanas berpengalaman, biaya produksi nanas, sudah termasuk semuanya dari bibit sampai panen, menghabiskan sekitar Rp 1000 sd 1500 per batang nanas. Jadi, menanam nanas memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pak Ali Makrup yang memiliki lahan 0,5 hektar, misalnya, menanam 40 ribu pokok nanas, sehingga modal yang diperlukan mencapai Rp 40-60 juta. Oleh sebab itu, modal usaha tani nanas cukup besar dan hanya bisa dilakukan oleh petani

pemilik tanah sendiri atau petani yang memiliki sumber penghasilan di luar pertanian nanas. Dengan memiliki tanah yang bisa diajukan sebagai agunan, petani pemilik usaha tani menengah dan luas memulai usaha nanas dengan mengandalkan pinjaman ke bank, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI. Meskipun pinjaman yang disetujui, menurut pengalaman petani menengah, biasanya tidak lebih dari 20 juta rupiah, atau berkisar 10 juta. Jika tidak ada tanah milik, maka modal biasanya berasal dari tabungan sendiri hasil dari beternak kambing dan sapi.

Bagi petani kecil yang memiliki kurang dari 1000 pokok nanas, bekerja sebagai buruh tani dan buruh serabutan menjadi cara untuk menyambung usaha tani selanjutnya. Karena usia panen nanas mencapai lebih dari satu tahun, petani nanas skala kecil juga memiliki tanaman lain, seperti cabai, tomat dan juga ternak ayam atau buka warung (Gambar 4). Menariknya, untuk beberapa perempuan petani, berjualan online bisa menjadi tambahan pendapatan. Jenis barang yang dijual online kebanyakan adalah barang-barang keperluan rumahtangga. Selain itu, meminjam kepada saudara, teman atau tetangga menjadi sumber permodalan utama bagi petani kecil. Alternatif lain adalah mengambil pinjaman modal dan pupuk ke pengepul, meskipun ini bukan menjadi pilihan ideal bagi petani. Seringkali, pengepul akan memotong hasil penjualan nanas sesuai dengan utang modal dan pupuk yang diambil oleh petani, tapi belum tentu pada tingkat harga ketika panen.

Rantai Produksi & Distribusi

Untuk memulai usaha tani nanas, petani Ngancar membeli bibit dengan kisaran harga mulai dari Rp 250 sampai Rp 1000 untuk bibit yang baik. Ada juga yang memilih untuk menggunakan bibit sendiri yang disisihkan dari hasil panen. Varitas yang biasa ditanam petani adalah nanas lokal, madu kelud dan smooth cayenne (dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai semut kayen). Semenjak Koperasi Langgeng Mulyo berkiprah di usaha nanas, Endro Puji Astoko, Ketua Koperasi yang juga menjadi dosen agribisnis di Universitas Islam Kadiri, sangat bersemangat untuk mengembangkan varitas baru dengan harapan bisa menaikkan harga nanas sampai Rp 20-30 ribu per kilogram. Pada 2010 didapatkan varitas baru yang diberi nama Pasir Kelud. Namun sayangnya, varitas ini belum sempat mengalami

perkembangan karena banyak dicuri. Saat ini, petani mendapatkan harga beli dari pengepul Rp 3000- Rp 3700 per biji untuk nanas madu kualitas terbaik (grade A), Rp 2000 untuk kualitas di bawahnya, dan nanas madu kelud Rp 7000-8000 per kg.

Petani nanas di Ngancar mendapatkan keperluan sarana produksi pertanian, seperti pupuk urea, pupuk cair, tetes tebu, juga pestisida, dari toko Koperasi Langgeng Mulyo. Hampir semua petani memanfaatkan toko koperasi, karena koperasi juga berperan sebagai pengepul. Dari hasil diskusi mendalam dengan Ketua Koperasi dan pengurus, jelas digambarkan bahwa Koperasi Langgeng Mulyo sudah sejak lama berperan penting dalam produksi dan distribusi nanas di Ngancar. Pada tahun 2012 Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo mulai merintis pemasaran buah nanas Smooth cayenne langsung ke supermarket di Kota Kediri dan Agro Fresh Kota Malang. Selain itu pihak Koperta juga melakukan pemasaran secara langsung di Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo dan di Pasar Wisata Gunung Kelud milik Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo (Dwi Intan, 2015). Kondisi yang diamati oleh Dwi Intan lima tahun lalu, masih berlangsung sama sampai sebelum pandemi menyebar. Namun ketika studi ini dijalankan di masa pandemi, pasar wisata terlihat sangat sepi akibat arus wisata ke gunung Kelud masih ditutup.

Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo sudah berumur cukup panjang. Sebelum memiliki badan hukum koperasi pada 25 Agustus 1999 dengan usaha Simpan Pinjam, koperasi ini didirikan akibat kesulitan pengadaan pupuk. Akhirnya lima orang, termasuk Endro Puji Astoko, berinisiatif mengumpulkan uang untuk menyediakan pupuk bagi petani. Dari inisiatif pembelian pupuk bersama, muncul usaha simpan pinjam dan akhirnya mengajukan pendirian koperasi sebagai badan hukum. Pada 2012, usaha Koperasi mulai merambah ke pemasaran nanas smooth cayenne, yang sebelumnya masih terfokus pada perdagangan sayur-mayur antar-daerah.

Saat ini, Koperasi Langgeng Mulyo sudah memiliki 3700 orang anggota yang berasal dari latar belakang beragam, bukan hanya petani nanas. Koperasi setia berperan sebagai penyedia modal bagi usaha pertanian dan peternakan, serta UMKM, termasuk petani anggota Gapoktan Langgeng Mulyo. Dari 3.700 anggota, 100 orang diantaranya memberi penyertaan modal sampai dengan 2,5 milyar rupiah. Modal ini diharapkan bisa memperkuat rencana Koperasi langgeng Mulyo untuk

mendirikan wahana agrowisata di tanah seluas 2,5 ha yang sekarang sudah dikuasai dan masih menganggur. Selain itu, dalam usaha simpan pinjam, tingkat pinjaman yang berani dikeluarkan oleh koperasi sudah mencapai 400 juta rupiah, diberikan terutama kepada pengusaha UMKM.

Koperasi ini juga berupaya mendayagunakan bibit dari varitas hasil pemuliaan dengan sistem kontrak tanam dan panen ke petani. Sayangnya, upaya ini belum berhasil karena banyak petani yang tidak menaati kontrak akibat banyak bermunculan pedagang baru yang menawarkan harga lebih bersaing. Menurut pengakuan Ketua Koperasi, kondisi itu menyebabkan kerugian koperasi sampai 230 juta rupiah, karena bibit yang tidak dikembalikan sebagai hasil panen. Koperasi Langgeng Mulyo juga menampung berbagai komoditi lain selain nanas, seperti cabai. Bahkan sudah melaksanakan pembelian berbasis kontrak dengan harga tetap kepada asosiasi petani cabai di Kediri.

Sumber: FGD Koperasi Langgeng Mulyo, 8 September 2020

Kotak 1. Koperasi Langgeng Mulyo

Perdagangan nanas di Ngancar yang diarahkan untuk ekspor pernah dicoba oleh Koperasi Langgeng Mulyo beberapa tahun lalu, dengan tujuan ke Singapura, namun gagal karena penanganan produk petani belum memenuhi standar prosedur ekspor, sehingga busuk sampai di tujuan. Akan tetapi, nampaknya kegagalan ini tidak menyurutkan rencana Ketua Koperasi untuk mencoba mengalihkan ekspor ke Timur Tengah, sebagaimana pengalaman beliau belajar dari keberhasilan PT. Great Giant Pineapple.

Nanas dari Ngancar memang belum semua masuk ke pasaran ekspor dan perdagangannya lebih dikuasai oleh pengepul dan pedagang grosir untuk pasar lokal dan nasional. Pak Tekad, seorang pengepul sekaligus petani nanas, menyatakan bahwa sebagai pengepul ia menjual komoditinya kepada pedagang grosir yang mendistribusikan ke pasar Surabaya dan Bali. Marjin penjualan dari pengepul ke grosir tidak banyak, beliau mengambil keuntungan 10-20%. Penelitian Mareta (2017) mengonfirmasi proporsi ini, karena ia pun menemukan bahwa marjin antara petani dan pengepul adalah Rp 1000, sedangkan antara pengepul dan pedagang grosir adalah Rp 2000.

Lain halnya bagi Bu Tri, seorang pedagang eksportir yang tinggal di desa Bedali. Beliau sudah menjalankan perdagangan ekspor nanas, baik segar maupun olahan, dengan tujuan Korea dan Taiwan. Karena permintaan dari eksportir selalu besar antara 10-20 ton, maka Bu Tri tidak terpaku pada pasokan nanas dari Kediri, tapi juga dari Subang, Jambi, Kalimantan demi memenuhi volume permintaan ekspor. Nanas Kediri diakui oleh Bu Tri jatuhnya mahal karena kualitas seratnya bagus, sehingga harganya dibanderol per biji. Bagi usaha Bu Tri yang mengolah nanas menjadi selai, kualitas buah memang tidak terlalu berpengaruh, sehingga ia lebih memilih nanas dari Subang yang lebih murah karena pembelianya bisa partai besar per kg. Meskipun perdagangan ekspor sangat rumit, karena sarat dengan berbagai izin dan surat-menyurat, tapi Bu Tri lebih menyukai memasok buat ekspor. Ia merasa terjamin kelancaran usahanya, karena permintaannya jelas dan tinggal mengikuti aturan yang disepakati saja. Namun, disadari oleh Bu Tri bahwa persaingan ekspor ke Taiwan sangat tinggi, setidaknya ada 6 negara yang juga memasok ke sana, misalnya olahan nanas dari Malaysia lebih murah dan bagus, sehingga harga harus dijaga agar tetap bisa bersaing.

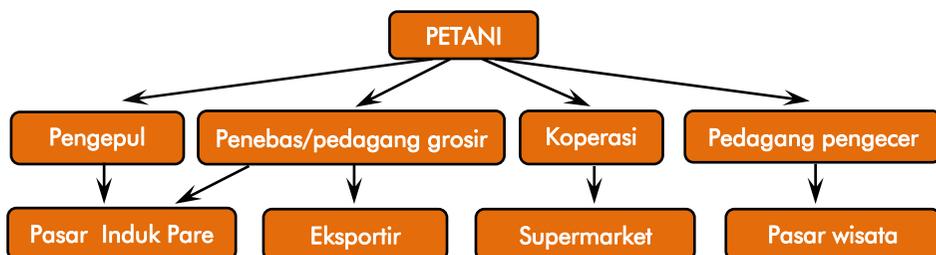
Dalam mengelola Pabrik selai nanasnya, Bu Tri bermitra dengan seorang 'Bos' yang berasal dari Cina. Pengusaha dari jauh ini membangun pabrik dan mendatangkan mesin, sehingga pabrik pengolahan nanas Bu Tri yang sempat habis kontraknya masih bisa terus berjalan sampai hari ini. Begitu masuk pesanan ekspor, ada 100-150 orang yang bisa bekerja di pabrik ini. Tenaga kerja di pabrik Bu Tri berasal dari banyak daerah, karena tenaga kerja dari sekitar sudah banyak pilihan kerja, demikian menurut Bu Tri. Pabriknya pun tidak hanya mengolah nanas, tapi juga berbagai bahan pangan lainnya, seperti ubi, pisang, dsb.

Beragamnya jalur pemasaran nanas membuat petani nanas skala kecil di Ngancar memiliki pilihan pasar yang sebenarnya cukup terbuka. Petani nanas skala kecil relatif memiliki daya tawar yang cukup tinggi, karena banyak pengepul dan pedagang grosir yang saling bersaing. Bahkan, petani juga bisa langsung menjual ke pedagang pengecer di pasar wisata Kelud. Ibu Widiani, petani nanas di Panceran, menceritakan bahwa ia biasanya menjual langsung ke pasar dengan sistem 'nota', yaitu penjualan per biji sesuai dengan harga per grade. Jadi, nanas dengan grad A dibanderol Rp 3.200, grade B Rp 2.600, sedangkan grade C dan D dibeli borongan. Cara penjualan yang dipilih oleh Ibu Widiani sepertinya bukan

cara yang kebanyakan dilakukan oleh petani besar dan kelas menengah, serta petani kecil yang butuh uang cepat. Sebagian besar petani menengah memilih untuk menjual 'daun', yaitu usia tanam 12 bulan dan belum ada buah, tapi sudah menjelang berbuah. Sistem penjualan seperti ini disebut sebagai 'tebasan' dan pembayarannya dilakukan sebagian, lalu dilunasi setelah panen. Harga tebasan dihitung per petak, tergantung jumlah pokok nanas yang ditanam, dan harga ini cukup bersaing.

Beberapa petani kecil yang membutuhkan uang tunai cepat juga memilih penjualan hasil melalui borongan atau tebasan. Misalnya, pengalaman Ibu Kartini, seorang kepala keluarga yang menghidupi dua orang anak sebagai petani nanas, dalam tiga kali panen nanas di lahan seluas 16 are yang dimilikinya, ia bisa memilih pemborong yang memberikan harga tertinggi. Panen pertama untuk 14 ribu pokok nanas, ia menerima harga borongan 23 juta rupiah dalam kondisi buah sudah tua. Pada panen berikutnya, ia memutuskan untuk menjual lebih cepat, karena pemborong mengeluh rugi jika membeli sudah cukup tua. Untuk 11 ribu pokok nanas, Bu Kartini menerima 18 juta rupiah. Ia menyetujui syarat yang diajukan pembeli, karena menurut perhitungannya nilai pembelian oleh pemborong itu sudah cukup menguntungkan. Bagi kebanyakan petani, penjualan kepada pemborong/penebas dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan karena uang tunai di tangan dirasakan segera dan dalam jumlah banyak. Bahkan, bagi sebagian petani hubungan antara petani dan penebas sudah merupakan hubungan langganan. Dengan demikian, pedagang baru yang coba-coba masuk belakangan memang harus bersaing cukup keras.

Berdasarkan beberapa uraian dari petani dan pedagang soal rantai distribusi, maka secara garis besar, beberapa jalur pemasaran nanas di Ngancar bisa digambarkan sbb:



Gambar 5. Rantai distribusi nanas di Ngancar

Cerita-cerita pengalaman petani menjual hasil panen nanas yang didapati oleh kajian ini juga serupa dengan temuan Rahayu (2018). Rahayu menjabarkan bahwa para pelaku pasar di perdagangan nanas di Ngancar terdiri dari: petani sendiri, pedagang pengepul desa, pedagang grosir, pedagang pengecer dan koperasi. Namun demikian, studi Rahayu tidak menyinggung soal sistem penjualan secara tebasan. Ada kemungkinan, sistem ini dijalankan oleh para pedagang grosir, karena jika dikaitkan dengan temuan Rahayu, mereka menguasai 42% dari pasar penjualan nanas. Fakta ini sangat logis, karena para petani nanas yang volume produksinya besar memang lebih suka menjual ke pedagang grosir untuk menghindari resiko busuk akibat buah lambat terjual atau tak terjual. Tak heran maka hasil penelitian Rahayu juga menunjukkan bahwa para pedagang grosir inilah sang penentu harga, sementara petani hanya penerima harga yang sulit melakukan tawar-menawar. Sementara itu, menarik juga diperlihatkan oleh Rahayu (2018) bahwa sesungguhnya petani yang paling untung adalah petani yang menjual produksinya ke Koperasi dan disalurkan langsung ke supermarket. Pada 2017, catatan Rahayu menunjukkan bahwa keuntungan petani adalah Rp 3900, sementara keuntungan koperasi hanya Rp 2300 dan supermarket menanggung laba lebih kecil dari petani, yaitu Rp 3400.

Dari gambaran kondisi produksi dan distribusi nanas yang dijalani oleh petani Ngancar sebelum pandemi, dapat dikatakan bahwa usaha tani nanas memang merupakan usaha tani yang dari sisi pasar cukup menguntungkan bagi petani Kediri. Meskipun terdapat kendala atas status penguasaan tanah untuk kebun nanas rakyat, adanya tekanan sewa tanah yang cukup besar dialami oleh petani nanas, juga keterikatan pada penebas, tetapi sepertinya bertani nanas masih dipandang sebagai salah satu sumber penghidupan yang diharapkan oleh petani. Tentunya kondisi keuntungan yang didapat oleh petani nanas, sangat tergantung pada skala ekonomi dari usahanya. Dengan kata lain, beda kelas petani, beda pula kondisi produksi dan keuntungannya. Bahkan bisa dikatakan, buruh tani yang tidak memiliki akses terhadap tanah bisa jauh berbeda kondisi dan kepentingannya terhadap pertanian nanas ini.

USAHA TANI JAGUNG

Majalah Tempo pada 1978 pernah meliput kejayaan dan kemunduran produksi jagung di Kediri. Rupanya, tercatat dalam sejarah bahwa Kediri merupakan penghasil jagung terbesar di Jawa Timur. Dari 1 juta ton produksi jagung di Jawa Timur pada 1976, 40% berasal dari Kediri. Angka ini pun bahkan terhitung kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika jagung masih mendominasi pangan pokok di Jawa Timur pada masa itu. Kemunduran produksi setelah tahun 1976, ternyata sangat mempengaruhi usaha pabrik pengolahan jagung PT Indocorn yang baru didirikan setahun sebelumnya di Bendo, Kecamatan Pare. Karena berharap pada produksi jagung Kediri yang melimpah, pabrik ini sedianya akan memproduksi tujuh jenis olahan jagung, termasuk minyak jagung dengan merk Sitanola. Apanya, pabrik Indocorn akhirnya harus mengandalkan jagung impor yang mahal, karena kemunduran produksi jagung Kediri. Menurunnya produksi diakibatkan oleh bersaingnya lahan penanaman jagung dengan padi dan tebu yang digencarkan oleh program BIMAS. Pabrik pengolahan jagung yang sempat memproduksi minyak jagung Sitanola, akhirnya kehilangan pasokan, karena ternyata setelah 'dibimaskan' petani lebih suka menanam padi dan tebu sebab memberi harga jual lebih baik (TEMPO, 1978).

Liputan lebih dari empat dasawarsa lalu itu menjadi menarik karena pada saat ini Kediri terhitung kembali sebagai bumi subur bagi agribisnis jagung. Minyak jagung memang sudah tamat riwayatnya dan Indocorn pun tinggal cerita. Yang sekarang berkembang pesat adalah korporasi-korporasi yang memproduksi benih jagung. Setidaknya ada dua korporasi besar yang menggunakan tenaga petani-petani jagung di Kediri sebagai produsen benihnya, yaitu: PT BISI dan PT Agri Makmur Pertiwi. Dari tanah Kediri, PT Agri Makmur Pertiwi, misalnya, melakukan ekspor 40 ton benih jagung manis ke Cina pada Januari 2020 lalu. Sementara itu, PT BISI pada 2018 mengeksport benih jagung hibrida sampai 900 ton ke Srilanka dan Pakistan.

Data BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa Kediri dalam satu dasawarsa terakhir memang masih merupakan penghasil jagung ke-5 terbesar di Jawa Timur. Namun demikian, bukan berarti bahwa pertanian jagung di Kediri tanpa masalah. Kehadiran korporasi yang siap menyerap produksi jagung petani malah meresahkan PemKab Kediri, karena peternak Kediri sempat berteriak kekurangan jagung untuk pakan ternak. Kondisi ini menyebabkan PemKab Kediri pada 2018 bertekad untuk memperkuat BUMD

penyerap jagung pakan agar pasokan pakan ternak di Kediri tidak mengalami kelangkaan. Dengan kata lain, persaingan pasar jagung di Kediri sendiri cukup ketat, akibat banyak terserap keluar Kediri. Terbukti saat ini, banyak CV usaha perdagangan jagung bermunculan. Di Kecamatan Puncu saja, misalnya, ada lebih dari 6 CV yang siap menyerap jagung konsumsi.

Selain masalah persaingan pasar, tanah petani yang sebagian besar berada di wilayah Perhutani, juga menjadi soal tersendiri. Lebih jauh lagi, terdapat penguasaan tanah yang luas di tangan-tangan pengepul, sementara banyak petani yang tanahnya sempit, sulit untuk mendapatkan modal tanam. Kondisi produksi dan distribusi jagung di Kediri yang digadang-gadang sebagai komoditi ekspor andalan statistik pemerintah daerah ini akan ditelisik dari aspek-aspek tanah, tenaga kerja, dan modal, serta segala masalah di lingkup distribusi pada bagian berikut.

Tanah, Tenaga Kerja dan Modal

Petani jagung di Kecamatan Puncu, yang menjadi pusat pembelajaran bagi kajian ini, jarang yang memiliki tanah milik sendiri. Hampir 90% usaha tani jagung berada di lahan yang dikuasai oleh Perhutani. Menurut ceritanya, sejak zaman simbah-simbah (kakek nenek moyang), mereka sudah tinggal di Kawasan yang diklaim sebagai Kawasan Perhutani secara berpindah-pindah, mengikuti pembukaan hutan untuk penanaman baru. Oleh sebab itu, mereka menyebut diri sebagai magersaren dan diartikan sebagai penduduk yang tinggal di dalam wilayah Perhutani. Disebut magersaren, karena mereka tidak bisa mendapatkan kepemilikan atas tanah yang mereka garap dan tinggal di tersebut, sehingga mereka tidak membayar pajak. Mereka menggunakan istilah tanah pemajekan untuk tanah yang berada di luar kawasan, karena pemilik tanah harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan demikian, dalam konteks historis seperti itu, mudah dipahami mengapa tindakan pembayaran pajak itu disamakan dengan pengakuan kepemilikan. Dalam perhitungan para petani Puncu, ada sekitar 14000 KK yang tinggal di Kawasan yang dikuasai Perhutani

Dari keseluruhan warga yang bisa mengakses lahan Perhutani tersebut, Nampak bahwa penguasaan tanah untuk usaha tani jagung di Kediri cukup timpang, karena dari hasil wawancara didapatkan adanya

petani yang menguasai sampai dengan 15 hektar, tapi ada juga yang sama sekali tidak memiliki tanah. Kondisi ini sepertinya sudah berjalan dalam waktu yang cukup panjang, karena menurut pengakuan petani Puncu, sesungguhnya setiap warga yang sudah menikah dan memiliki KTP dan KK bisa mengajukan permintaan untuk mengakses tanah Perhutani seluas 18-20m x 100 m atau sekitar 1800-2000 m². Karena tanah ini tidak seberapa, maka ketika salah satu dari mereka membutuhkan uang, biasanya tanah jatah kelola tersebut 'diborongkan' ke tetangga atau petani lain selama jangka waktu tertentu dan dibayarkan sejumlah uang yang disebut sebagai 'ganti rugi'. Mereka sangat sadar bahwa jual-beli tidak diperbolehkan, sehingga jalan itulah yang ditempuh. Para pesanggem atau orang yang menerima jatah tanah Perhutani untuk dikelola ini berada di dalam kelembagaan LMDH.

Petani jagung pemilik tanah dan mereka yang memiliki akses terhadap tanah Perhutani, baik langsung maupun lewat LMDH, mencapai skala ekonomi ketika luasannya besar, karena modal per hektar per musim tanam mencapai Rp 10-15 juta. Menurut pengakuan seorang 'kontraktor benih', keuntungan bisa didapat ketika lahan yang dikuasai minimal 10 hektar. Oleh sebab itu, penguasaan tanah perseorangan di wilayah Perhutani ini bisa mencapai 10 hektar lebih melalui 'kerjasama' dengan LMDH. Apalagi ketika agribisnis perbenihan berkembang, harga benih jagung hibrida dan jagung manis mencapai Rp 8-12 ribu per kg di tingkat petani jagung dan pasti memiliki pembeli. Harga ini meningkat cukup pesat, mengingat pada 2010 harga benih di tingkat petani hanya Rp 3000. Hal ini mendorong perluasan tanah untuk usaha tani jagung menjadi cukup masif, karena adanya perbedaan pasar, yaitu pasar untuk jagung konsumsi, pakan ternak dan benih. Diversifikasi pasar menyebabkan usaha tani jagung dinilai makin terbuka bagi petani. Namun demikian, serupa dengan usaha tani nanas, hanya petani skala besar yang juga sekaligus tengkulak atau pengepul yang bisa memanfaatkannya.

Petani-petani bertanah luas ini mempekerjakan buruh tani untuk pekerjaan menanam, merawat sampai dengan panen. Upah yang diterima buruh tani untuk pekerjaan di usaha tani jagung sama dengan nanas, yaitu jika bekerja hanya pagi hari untuk 3 jam, upahnya Rp 25-30 ribu, sedangkan jika sampai tengah hari mencapai Rp 45-50 ribu. Kebanyakan buruh tani adalah ibu-ibu yang bekerja hanya menjadi buruh. Dari cerita beberapa perempuan petani yang bekerja sebagai buruh tani pada seorang

petani jagung bertanah seluas 6,5 hektar, terdiri dari milik sendiri dan 'kerjasama' dengan Perhutani, terungkap bahwa mereka merasa hanya 'bisa makan' tiga bulan sekali ketika panen jagung. Dengan kata lain, masa panen jagung adalah masa ketika mereka bisa memegang uang cukup dibandingkan kesehariannya. Sehari-hari mereka mendapat uang dari mencari kayu bakar di wilayah tegakan kayu Perhutani untuk dijual. Andaiapun mereka mau mencoba bertani dan memiliki akses di lahan perhutani, mereka mengaku tidak punya cukup uang untuk memodalinya.

Dalam hal permodalan, petani yang juga menjadi pengepul dan tengkulak mendapatkan kemudahan mengakses kredit ke bank, karena luasan tanah yang dimiliki dan dikuasainya rata-rata ada di atas 2 hektar. Sementara itu, bagi petani yang skala usaha taninya tidak terlalu besar, atau tidak memiliki sumber penghasilan lain di luar produksi jagung, ijon menjadi pilihan. Dengan menyetujui ijon, petani bisa mengambil modal dulu, lalu membayarnya dengan hasil panen yang sudah ditaksir sebelum usia jagung tua. Ada juga yang bisa bertahan karena memperoleh pinjaman tanpa bunga dari sanak kerabat. Jelaslah, pilihan akses permodalan ini menggambarkan posisi sosial ekonomi petani jagung yang berbeda-beda.

Rantai Produksi & Distribusi

Jauh sebelum agribisnis benih jagung berdiri, petani jagung Kediri sudah berpengalaman puluhan tahun menyilangkan dan memuliakan benih. Sertifikasi benih jagung produksi pabrik menjadi pil pahit bagi petani, terutama ketika muncul kasus penangkapan petani pada 2010 karena tuduhan menjual benih jagung PT BISI secara ilegal. Namun demikian, bagi petani jagung yang sudah memiliki keahlian, kriminalisasi tidak menyurutkan upaya pemuliaan benih yang mereka lakukan. Dari penjelasan beberapa petani berskala besar, pemuliaan benih jagung untuk konsumsi masih mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan benih sendiri. Caranya adalah dengan menyilangkan jenis jagung yang mereka tanam dengan jenis jagung baru. Alasannya, kalau membeli akan menaikkan ongkos produksi sangat tinggi, karena harga benih jagung hibrida produksi BISI, misalnya, di pasaran online mencapai Rp 70 ribu per kg. Padahal, harga di tingkat petani hanya Rp 8000-10000. Marjin yang sepuluh kali lipat ini pula yang sempat menjadi pokok persoalan protes petani yang biasa membuat benih sendiri.

Dengan melakukan penyiangan benih sendiri, ongkos produksi per hektar bisa ditekan sampai berkisar antara 10-15 juta.

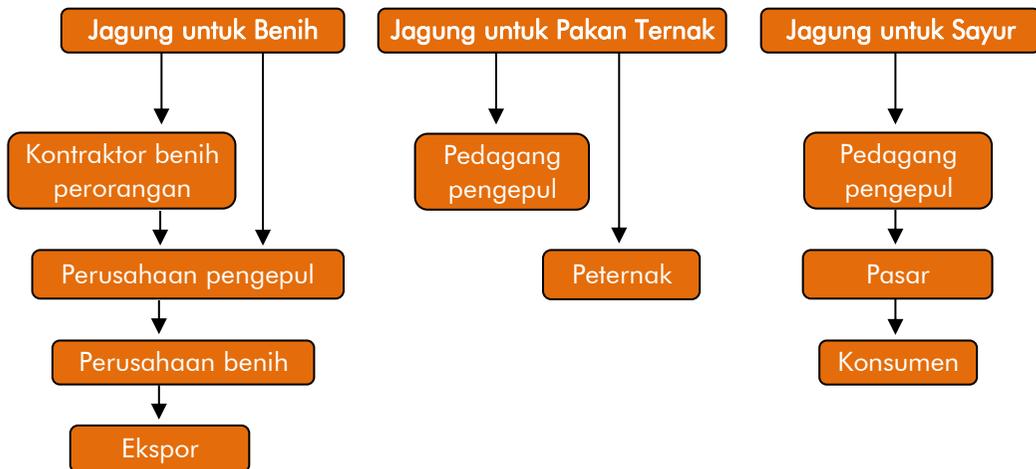
Penjualan produksi jagung konsumsi dan benih biasanya dilakukan petani melalui sistem kontrak dengan pembeli langganan. Bu Sulastri dan Pak Salim, keluarga petani jagung yang sekaligus menjadi pengepul, menyampaikan pengalaman mereka bahwa penerapan sistem kontrak pun belum tentu memastikan pasokan. Mereka masih sering mendapatkan petani yang enggan menaati kesepakatan harga pembelian dan diam-diam menjual ke pengepul lainnya. Bu Sulastri menyesalkan itu dan baginya lebih baik menaikkan harga sesuai harapan petani pelanggan daripada kehilangan pasokan. Kondisi ini setidaknya menunjukkan persaingan yang ketat di kalangan pengepul dan pedagang. Sementara bagi petani, harga di tingkat petani untuk jagung konsumsi sebesar Rp 3500-3700 dan untuk benih Rp 8000-12000 dianggap sudah cukup menguntungkan. Selain kontrak ke pengepul/pedagang, petani juga bisa menjual langsung ke peternak.

Dalam rantai pasok untuk jagung benih, ada pula yang disebut sebagai 'kontraktor benih'. Cara kerja kontraktor benih ini adalah menjadi mediator antara perusahaan penangkar benih dengan petani penangkar. Pertama, mereka mencari pembeli dulu dan biasanya pembeli adalah perusahaan benih, baik BUMN (Pertani), maupun swasta (BISI, Pertiwi, dan perusahaan kecil seperti BCA). Kedua, kontraktor mengambil benih ke perusahaan untuk diserahkan ke petani. Ketiga, ketika petani panen dilakukan bagi hasil antara kontraktor dan petani atau kelompok tani. Misalnya, untuk penjualan ke perusahaan swasta yang sudah memberi harga tetap per kg Rp 5000, harga yang diterima petani adalah Rp 4000, kontraktor benih Rp 750 dan kelompok tani Rp 250. Untuk penjualan ke Pertani (BUMN) yang biasanya lama pembayarannya, benih hasil penangkar petani dibeli kontraktor Rp 25000 per kg dan dijual ke Pertani Rp 37000.

Bagi sebagian besar petani, terutama petani dengan usaha tani cukup besar (di atas 1 hektar) ada keengganan untuk keluar dari hubungan langganan yang sudah mereka miliki dengan para kontraktor benih ini. Kepastian pasar bagi petani golongan ini jauh lebih penting daripada mencari-cari pembeli yang berani memberi harga yang lebih tinggi. Menurut mereka, mencari pembeli baru itu makan tenaga karena lobby-lobby harga

yang biasanya panjang dan belum lagi resiko tertipu. Hubungan langganan dirasakan lebih nyaman karena dilandaskan pada kepercayaan. Oleh sebab itu, pilihan petani dijumpai pada menanam jagung untuk pasar-pasar yang berbeda ketimbang mencari harga tinggi untuk satu jenis jagung. Petani skala luas menanam jagung untuk beragam serapan pasar, yaitu: jagung untuk konsumsi manusia, untuk pakan ternak dan untuk benih. Bahkan mereka pun meragamkan tanaman komoditinya agar tak melulu jagung. Ada yang mengkombinasikan dengan menanam sayuran, cabai dan tomat untuk dijual. Dengan demikian, petani jagung adalah petani multicrop (ragam macam tanaman) yang tak ingin menggantungkan penghidupan hanya dari satu jenis komoditi, bahkan satu sumber nafkah. Sebagaimana halnya dengan petani nanas, tetap saja posisi kelas sosial ekonomi petani menjadi penentu sejauhmana usaha tani jagung ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di tengah masalah akses terhadap tanah yang timpang dan munculnya korporasi sebagai pemain pasar baru.

Dari beberapa penjelasan mengenai jalur pemasaran berdasarkan jenis-jenis jagung untuk kebutuhan berbeda tersebut, bisa digambarkan alurnya sbb:



Gambar 6. Rantai distribusi jagung

PERTANIAN PETANI (PEASANTS' FARMING) DALAM RANTAI NILAI GLOBAL

Menilik serba-serbi usaha tani nanas dan jagung di Kediri semasa sebelum terjadinya pandemi Covid 19, dapatlah dikatakan bahwa dua usaha tani ini merupakan usaha tani yang menjadi gantungan kehidupan berbagai kelas sosial ekonomi petani, termasuk buruh tani. Meskipun usaha tani jagung sudah berumur lebih panjang daripada nanas, namun sejak satu dasawarsa terakhir, kedua usaha tani ini sudah memasuki rantai nilai global. Keterkaitan pada rantai nilai komoditi global, baik pada usaha tani nanas maupun jagung, terbentuk ketika usaha korporasi mengambil bagian pada rantai nilai yang sebelumnya tidak ada dengan melakukan perdagangan ekspor. Pada usaha tani nanas, rantai nilai terbentuk di produksi komoditi pasca panen (off-farm) atau di hilir, yaitu pada pengolahan nanas baik setengah jadi maupun jadi, sedangkan pada usaha tani jagung terjadi di rantai nilai paling hulu, yakni pada produksi benih.

Terbentuknya rantai nilai baru oleh korporatisasi perdagangan ekspor komoditi pertanian, baik di hulu maupun di hilir, telah mengakibatkan terombang-ambingnya petani dalam penentuan harga yang dikuasai oleh pedagang pengumpul. Terlepas dari skala usaha taninya, posisi petani akhirnya hanya sebagai penerima harga yang memiliki daya tawar terbatas. Meskipun rentang daya tawar ini pada praktiknya sangat tergantung pada skala usaha tani komoditas tunggal, dan ada atau tidaknya usaha di luar pertanian, namun dominasi pedagang dalam penentuan harga lebih kuat. Menghadapi posisi tersebut, demi menyelamatkan kepastian pasar, petani cenderung memilih hubungan berlangganan karena hubungan ini berlandaskan pada kepercayaan yang sudah teruji. Di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan tipisnya kemungkinan bagi masuknya pedagang pengumpul baru, sehingga kompetisi harga hanya dibuka oleh adanya pasar baru yang dimunculkan oleh varitas baru ataupun entitas baru penampung komoditas (supermarket, pasar wisata atau ekspor). Bagi petani, kondisi ini menyebabkan harga yang cenderung stagnan, bahkan semakin merugikan. Stagnasi terjadi karena sistem pemberian harga secara kontrak, tebasan atau ijon (harga ditetapkan sebelum panen dan tidak mengikuti harga pasar waktu panen) menjadi dominan.

Dalam kondisi rantai produksi dan distribusi yang nilai lebihnya dikuasai oleh perantara (pedagang pengumpul), maka korporasi, koperasi,

dan usaha dagang menengah untuk pengolahan komoditi berusaha menekan kerugian dengan menerapkan standar kualitas komoditi. Dengan cara tersebut, resiko dialihkan pada petani, karena petanilah yang menanggung beban dari produk yang ditolak oleh standarisasi. Khusus pada usaha pengolahan nanas, standar terletak pada kualitas komoditi (untuk ekspor segar) dan harga terendah (untuk ekspor olahan). Akibatnya, penyerapan nanas lokal untuk ekspor sangat minim atau tidak terjadi. Dengan demikian, meskipun dalam pandangan petani nanas dan jagung di Kediri kedua usaha tani ini memberikan akses pada penghidupan yang cukup, posisi petani dan buruh tani dalam rantai komoditi yang diperpanjang oleh masuknya korporatisasi di hilir dan di hulu telah menyebabkan perkembangan ekonomi di tingkat rumah tangga petani cenderung stagnan. Kondisi stagnasi ini menyebabkan posisi petani rentan terhadap munculnya guncangan. Alih-alih menjadi resilien, ketika resiko yang dihadapi oleh petani semakin besar, maka petani semakin terpuruk.

Kondisi kerentanan ini diperparah dengan akses petani pada tanah yang penuh ketidakpastian, sehingga mudah dipermainkan oleh para pencari rente. Dominasi penguasaan tanah oleh Perhutani yang ingin dikoreksi melalui program perhutanan sosial tidak mampu mengatasi ketimpangan. Pada praktiknya hanya anggota LMDH lah yang menerima manfaat terbesar, sementara petani yang tidak tergabung dalam keanggotaan LMDH tetap harus mengakses tanah melalui perantara yang memakan biaya besar. Alih-alih menyelesaikan persoalan ketimpangan, program perhutanan sosial ini menjadi alat untuk melanggengkan ketimpangan akses terhadap tanah secara legal dan illegal.

Kombinasi antara kerentanan akses pada tanah dan kerentanan petani akibat lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai yang ditalikan ke pasar global oleh korporasi (hulu-hilir), pada akhirnya mendudukkan petani di posisi terlemah dari keseluruhan rantai pasok pangan. Struktur pertanian petani nanas dan jagung di Kediri, terutama pada kelas petani menengah-atas, menunjukkan bahwa sistem pangan global yang diatur oleh rezim perdagangan ekspor telah menguntungkan mereka yang mampu memenuhi aturan main, namun menyingkirkan petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki akses terhadap modal. Menariknya, ketika petani kecil tidak berdaya untuk memperbesar skala usaha dan tidak masuk dalam hubungan-hubungan komoditi yang panjang, mereka relatif bisa memiliki

daya tawar yang tinggi pada kondisi pasar yang penuh persaingan. Meskipun kasus terakhir ini tidak banyak terjadi.

3

RANTAI PASOK KOMODITI EKSPOR DAN KERENTANAN PETANI SEMASA PANDEMI COVID-19

Laksmi A. Savitri

Saat covid 19 belum melanda, secara umum gambaran atas kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa warga Kediri adalah warga dengan kesejahteraan menengah/średang. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Kediri mencapai 71,07 dan selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 71,85 atau tumbuh 1,10 persen (BPS Jawa Timur 2019). Angka ini tertinggi ke-5 di Jawa Timur dan berada di peringkat rata-rata seluruh Indonesia. Dengan kata lain, kesejahteraan penduduk Kabupaten Kediri adalah gambaran kesejahteraan penduduk Indonesia pada umumnya. Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kediri 2019 yang mengikuti versi Bank Dunia untuk pengelompokan penduduk berdasarkan pengeluaran, menunjukkan bahwa kelompok penduduk dengan pengeluaran 40%

terbawah di Kediri menghabiskan lebih dari 50% dari total pengeluarannya hanya untuk makan. Sebaliknya, pada kelompok pengeluaran 20% teratas hanya kurang dari 40% pengeluarannya digunakan untuk keperluan makan. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa kejadian pandemi akan berdampak lebih parah pada penduduk yang sebagian besar pendapatannya hanya untuk makan, apalagi jika pasokan pangan terhambat.

Petani yang meliputi jumlah terbesar penduduk pedesaan Jawa, merupakan kelompok yang sering termasuk dalam kategori penduduk miskin pedesaan. Menariknya, dalam kondisi pandemi covid-19 ini, beberapa media mengabarkan bahwa Pandemi Covid-19 membawa berkah tersendiri bagi petani nanas di lereng timur Gunung Kelud, Blitar, Jawa Timur, karena permintaan nanas banasari justru makin meningkat. Tak hanya permintaannya yang meningkat, tapi harga jual nanas banasari juga bagus dan menguntungkan petani. Harga jual di tingkat petani untuk grade A adalah Rp10.000 per biji, grade B Rp8.500 per biji, Grade C Rp7.000 per biji, Grade D dan E di kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000 per biji. Namun sayangnya, cerita indah ini tidak dinikmati oleh petani nanas maupun jagung di Kediri. Covid-19 tidak mendatangkan anomali yang menguntungkan bagi mereka. Kondisi pemasaran nanas tidak sebaik petani nanas Banasari di Blitar, karena serapan pasar yang jauh berkurang telah menjatuhkan harga jual nanas. Tak terkecuali, kondisi kejatuhan harga juga turut melanda nasib para petani jagung Kediri. Bagaimana dampak dari terhambatnya jalur pasokan terhadap kondisi kehidupan petani Kediri secara lengkap akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya.

TERPURUKNYA PERDAGANGAN EKSPOR

Bu Tri, seorang pengusaha ekspor nanas olahan di desa Bedali, menceritakan bahwa usahanya menderita kerugian bisa sampai 100 juta per bulan, karena masih harus mempertahankan pekerja sebanyak 12 orang yang sudah memiliki keterampilan pengemasan, ketika permintaan ekspor selai nanas terhenti. Gaji pegawai terpaksa dikurangi 50% untuk menahan pegawai terampil tidak sampai pindah kerja, padahal tidak ada permintaan ekspor. Sementara itu, tagihan pembayaran air dan listrik terus berjalan dan

harus dibayar demi menyelamatkan usaha yang masih berlangsung meski tersendat.

Dalam kondisi pandemi, pengusaha ekspor belum tentu bisa mengandalkan permintaan lokal untuk nanas, karena jumlah permintaannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan permintaan ekspor. Kemungkinan besar kecilnya permintaan ini karena pasokan lokal sudah lebih dulu diserap oleh para pedagang lokal. Sementara itu, dalam kasus usaha ekspor Bu Tri, pajak produksi naik 100% pada tahun ini, karena usaha Bu Tri terkena audit pajak. Permintaan ekspor terakhir adalah ketika menjelang Imlek dan Lebaran. Perusahaan beliau sempat membeli 6 mobil bak nanas bukan kupasan, tapi setelah itu terhenti. Tak ada lagi permintaan ekspor ini menurut Bu Tri diakibatkan oleh lockdown di negara-negara pengimpor nanas, seperti Korea dan Taiwan. Sebagai bukti, ia menuturkan bahwa lockdown telah menyebabkan 'Bos' usaha dagang Bu Tri yang berasal dari Cina tidak bisa pulang. Meskipun Bu Tri sendiri bertani nanas, tapi ia menganggapnya sebagai usaha sendiri yang tidak terkait pabrik.

Dari sisi kebijakan PSBB dan diikuti oleh kebijakan normal baru di beberapa wilayah, biaya angkutan barang meningkat karena penerapan protokol kesehatan, seperti biaya swab, rapid test pada operator angkutan dan staf logistik, belum lagi jalan yang ditempuh lebih panjang karena penutupan akses. Jenis angkutan barang untuk jalan darat, udara dan laut menjadi terbatas, biaya meningkat, sementara frekuensi layanan menurun. Bagi kebanyakan pengusaha ekspor sekelas Bu Tri, kondisi seperti ini tidak bisa diatasi.

Keterpurukan ekonomi karena pandemi juga sangat dirasakan oleh petani nanas, baik berskala usaha kecil, sedang maupun besar. Secara umum kejatuhan harga nanas yang cukup signifikan dirasakan menyulitkan. Jika harga 'nota' untuk grade A mencapai Rp 4500 sebelum pandemi, pada saat pandemi jatuh menjadi cuma Rp 3000-3200. Padahal, se kecamatan Ngancar ada 2400-2500 hektar kebun nanas yang didominasi oleh varietas quin dengan harga rendah tersebut, sementara varietas smooth cayenne yang memiliki harga tertinggi sampai dengan Rp 7000-8000 ketika pandemi, hanya mencakup 50 hektar saja. Meskipun nanas tidak mengalami panen raya karena pembuahan bisa diatur dengan perlakuan, sehingga pasokan bisa diatur bertahap, tapi kejatuhan harga tetap dirasakan berat. Akibat

PSBB dan ditutupnya wisata, serta beberapa daerah jalur logistik, harga jatuh bukan karena terlalu banyaknya pasokan, tapi karena tidak ada pembeli.

Dalam kondisi yang kurang menguntungkan petani karena banyak nanas yang tak terjual, BUMDES desa Sempu di Ngancar berusaha membuka peluang pasar dengan pengolahan nanas menjadi minuman. Sebelum pandemi sebetulnya ada 3 BUMDES yang sudah bergerak di pengolahan nanas untuk minuman selain BUMDES Sempu, yaitu di Babadan dan Bedali. Apa nyana, pandemi mengakibatkan dua BUMDES berhenti beroperasi karena ibu-ibu pekerja khawatir terkena korona dan pemasaran juga sulit. Hanya BUMDES di Sempu yang bertahan, meskipun penjualannya berkurang hampir 70%. Pada awalnya BUMDES Sempu pun sempat berhenti memproduksi, tapi setelah sosialisasi penerapan protokol Kesehatan, lima orang ibu kembali bekerja. Strategi pemasaran sangat didukung oleh kebijakan pemerintah desa yang disebut sebagai 'bela beli', yakni membela desa dengan membeli produk sendiri. Melalui Kerjasama dengan komunitas mobil, kelompok agama yang mengadakan pengajian, serta kelompok seni, akhirnya BUMDES Sempu masih bisa mempertahankan penjualan. Terobosan ini menjadi bermakna ketika yang ditumbuhkan adalah kesadaran untuk bersolidaritas, bahkan sebagian pengurus BUMDES tetap bekerja sebagai relawan tanpa dibayar. Akan menjadi cerita yang berbeda tentunya, ketika usaha dijalankan secara individual dan kompetitif.

Kompetisi pasar tak pelak telah menempatkan nasib pedagang benih jagung untuk ekspor tak jauh berbeda dengan nasib pedagang ekspor nanas. 'Kontraktor benih' jagung atau lugasnya, perantara penangkaran benih untuk ekspor, menjadi pihak yang terhempas dampak ekonomi dari pandemic secara cukup mengenaskan, bahkan dibandingkan dengan petani jagungnya sendiri. Pak Yudi, kontraktor penangkaran benih, mengungkapkan bahwa kontrak yang ia dapatkan dari perusahaan benih jagung berkurang hampir sepuluh kali lipat semasa pandemi. Misalnya, ia biasa mendapat kontrak untuk penanaman 50 hektar sebelum pandemi, sekarang hanya 5 hektar saja. Singkatnya, pak Yudi menyebut usahanya macet atau vakum, karena baginya kalau hanya tanam 5 hektar, keuntungan hanya 'habis di jalan' saja atau habis terserap biaya operasional.

Kondisi ini pun merembet ke petani jagung yang mengakui bahwa penanaman jagung untuk penangkaran benih perusahaan hampir tidak ada. Rata-rata petani jagung di Kecamatan Puncu menanam untuk pakan atau

untuk sayur saja. Harga jagung untuk pakan memang sempat turun sampai Rp 3000-3200 per kg, tapi ketika new normal diberlakukan, harga sudah mencapai Rp 4000. Bagi petani yang sekaligus pengepul dan bermodal, periode kejatuhan harga itu seperti durian runtuh dan dimanfaatkan untuk menimbun. Jagung memang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, tidak seperti nanas. Begitu harga membaik menjadi Rp 4000, pedagang pengepul bisa meraup untung Rp 800 per kg. Keuntungan instan ini tentu hanya bagi mereka yang memiliki modal, sementara petani, dikatakan oleh ibu-ibu yang diwawancarai, 'balik ke tegalan'. Sementara itu, harga jagung muda untuk sayur pun sangat fluktuatif, tidak pernah stabil, seperti halnya harga sayuran lain yang ditanam petani. Hanya timun dan kacang tanah yang relatif baik harganya, karena serapan pasar lokal untuk pakan ternak sapi tak terhenti.

Di sisi korporasi penangkar benih, khususnya PT BISI yang ada di Kediri, kondisi pandemi yang menyebabkan tertutupnya beberapa jalur logistik untuk ekspor nampaknya tidak terlalu berdampak. Diaku oleh PT Bisi pada 2018 bahwa korporasi ini menguasai 50% pasar benih jagung hibrida nasional, sisanya diisi oleh para produsen benih lainnya, seperti Pioneer, Syngenta, dll . Sejak Indonesia menutup impor benih jagung pada 2018, dikutip oleh Liputan 6, Manajer Pemasaran Wilayah Barat PT Bisi International, Hari Prabowo, mengatakan bahwa "Kapasitas produksi benih jagung sekitar 70-80 ribu ton per tahun. Produksi ini sebagian besar memenuhi kebutuhan benih jagung pada Upaya Khusus (Upsus) dan sisanya, masuk pasar bebas" . PT BISI baru pada 2018 mulai mengeksport benih 20 ton jagung hibrida ke Srilanka dan menargetkan bisa mengeksport sampai 1000 ton di tahun berikutnya. Sementara realisasi ekspor benih hibrida oleh PT BISI tahun 2020 belum teridentifikasi, PT Agri Makmur Pertiwi menyatakan di awal tahun 2020 telah mengeksport benih jagung manis ke Tiongkok. Gelombang ekspor benih ini disusul oleh PT Twin dari Kediri yang mengeksport benih jagung hibrida melalui penangkaran yang dilakukan oleh petani Tuban . Nampaknya, biaya angkutan barang dan kendala jalur logistik bisa dialihkan menjadi biaya yang ditanggung konsumen, bukan menjadi resiko pembiayaan sepenuhnya oleh bisnis korporat. Dengan begitu, kebijakan peningkatan ekspor komoditi pertanian yang digenjut semasa pandemi ini tidak berdampak secara signifikan bagi korporasi dan sebagian golongan petani yang produknya diserap langsung oleh korporasi. Sementara itu, bagi petani yang harus berjuang di pasar bebas, serta memiliki kuasa yang lemah untuk mengalihkan biaya logistik ke konsumen,

seperti pasar eceran daring, jangkauan dukungan pemerintah terasa sangat jauh, sebagaimana tergambar di bagian selanjutnya.

KERENTANAN PETANI KECIL

Kenaikan ongkos produksi dan kejatuhan harga hasil panen semasa pandemi diakui datang sebagai hal yang tak terduga bagi petani. Yang paling meresahkan petani adalah kelangkaan pupuk subsidi, sementara pupuk non-subsidi harganya melambung naik. Semisal untuk urea, harga sebelum pandemi per sak (50 kg) Rp 95000, lalu naik menjadi Rp 280000, ZA juga harganya dari Rp 82000 menjadi Rp 95000. Di lain pihak, karena banyak petani tidak tergabung dalam kelompok tani, akses terhadap pupuk subsidi pun sulit. Akibatnya, petani mengurangi jumlah pupuk dan menyebabkan produktivitas menurun.

Seperti jatuh tertimpa tangga, sudah biaya produksi meningkat, panen berkurang, lalu harga pun jatuh. Harga jagung untuk pakan biasa diterima petani antara Rp 4000-4500 jatuh menjadi Rp 3200. Untungnya, ketika new normal diberlakukan harga kembali membaik. Di samping itu, permintaan yang tak pernah surut untuk jagung pakan, masih bisa menyelamatkan pendapatan petani, karena cara panennya adalah 'babat masal', yaitu ketika umur 85-90 hari tanaman ditebas semua sampai ke pokok jagungnya, bukan hanya buah, lalu diolah dengan cara fermentasi untuk pakan sapi. Dengan demikian, perputaran uang untuk modal masih dimungkinkan, meskipun banyak yang harus dikurangi. Penggunaan tenaga kerja, misalnya, hampir tidak ada, sebab semua dikerjakan oleh petani sendiri. Imbasnya terhadap buruh tani sangat terasa. Akhirnya, seperti efek domino, semua saling terkait dalam keterpurukan.

Kondisi yang sama juga dirasakan oleh petani nanas. Harga nanas sempat jatuh sampai Rp 3000 untuk nanas grade A, yang sebelumnya bisa mencapai Rp 3500-4000. Pengiriman ke pasar selalu membusuk sekitar 30%, sehingga permintaan selanjutnya ke pedagang grosir pun menurun 30%. Lagi-lagi sebuah efek domino, pembelian di tingkat petani akhirnya menjadi berkurang sampai 30%. Namun tak lama kemudian, petani mensyukuri harga nanas membaik setelah new normal diberlakukan. Meskipun untuk para pedagang di pasar wisata Kelud, penutupan wisata

masih membuat kondisi penjualan tak membaik secepat yang diharapkan. Dari puluhan kios yang berada di pasar wisata ini, hanya empat kios yang terlihat masih bertahan dan bisa menjual nanas madu seharga Rp 10000-20000 seikat (isi 5-6 buah) untuk grade B dan C.

Ketika petani nanas maupun jagung berusaha mencari jalan selamat dengan meragamkan jenis tanaman untuk dijual dengan komoditi sayur-sayuran, seperti: cabai, tomat, timun dan kacang, strategi ini pun tidak sepenuhnya berhasil mengatasi penurunan pendapatan semasa pandemi. Penyebab utamanya adalah permintaan pasar yang jauh berkurang atau sama sekali tidak ada. Harga tomat hancur sampai Rp 400, sehingga dibiarkan membusuk di lahan. Untunglah, harga timun dan kacang tanah justeru membaik menjadi Rp 4000 karena serapan pasar yang tinggi untuk pakan ternak. Sementara itu, petani yang menjadi peternak ayam pun mengeluh karena sampai harus menjual ayam per ekor di harga Rp 10000, padahal sebelum pandemi bisa mencapai Rp 40000. Petani memperhitungkan bahwa PSBB yang membuat banyak pasar dan supermarket tutup menyebabkan serapan pasar pada produk pangan berkurang sampai 60%. Menurut pandangan mereka kondisi itu ditambah dengan daya beli yang menurun, baik di pihak konsumen maupun produsen, telah menjadi pil pahit.

Dengan kondisi penurunan pendapatan tersebut, ibu-ibu buruh tani dan petani kecil mengeluhkan iuran BPJS yang naik sampai 50%, juga biaya sekolah yang melonjak karena harus dilakukan secara daring. Biaya paket internet sebesar Rp 60000 yang habis hanya lima hari untuk anak yang duduk di SMA. Beban baru ini dirasakan sangat berat, karena jika dihitung per bulan akan mencapai Rp 240000. Bagi buruh tani dengan upah Rp 25-30 ribu per hari tentu tambahan biaya pendidikan ini menjadi hampir tak terjangkau. Sementara itu, semasa pandemi, peluang kerja sebagai buruh tani tak datang setiap hari, sebagaimana sebelumnya. Jika sebelum pandemi kerja tani di ladang orang bisa terbuka setiap saat, kini satu minggu belum tentu ada 3 hari bekerja. Ada warga yang bisa memasang jaringan internet di rumahnya dan menyediakan sewa Rp 2000 untuk 6 jam dan ini diakui sangat membantu. Namun demikian, beban ibu maupun bapak untuk menemani anaknya belajar dirasakan sangat berat dan membuat stress para orangtua karena materi pembelajaran yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan generasi orangtuanya. Belum lagi jika tidak memiliki hape android, orangtua harus mencari utangan untuk membeli hape. Ketika

tidak semua orangtua paham menggunakan hape android, mereka juga merasa kesulitan untuk memeriksa apakah anaknya betul-betul belajar atau hanya bermain hape saja. Pada intinya, biaya pendidikan menjadi beban baru di masa pandemi, ketika pendapatan petani jauh dari harapan.

Dari beberapa kondisi yang digambarkan sebelumnya terkait dengan posisi petani dalam rantai komoditi nanas dan benih jagung di Kediri yang mengglobal, jelas bahwa PSBB secara nasional dan lockdown yang terjadi di berbagai negara akibat pandemi covid-19, telah mengguncang ketahanan ekonomi petani produsen pangan skala kecil. Namun, tergantung dari komoditi yang ditanam, skala usaha tani, jaminan akses pada tanah dan panjang-pendek rantai pasok, dampak ekonomi menerpa secara berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan oleh Arias et al (2013) bahwa petani skala kecil itu sangat beragam, dan mereka pun menghadapi kendala dan peluang yang berbeda-beda, sehingga reaksinya terhadap kondisi-kondisi pasar akan berbeda.

Pengalaman buruh tani dan petani kecil Kediri menunjukkan bahwa kejatuhan harga komoditi yang dibarengi oleh kenaikan biaya produksi, ternyata tidak bisa sepenuhnya diatasi dengan sekedar meragamkan produk komoditi dan sumber nafkah. Apalagi jika produk komoditi yang diandalkan adalah komoditi pangan yang mudah busuk, seperti sayur-sayuran, maka kerugian dari tanam produk beresiko tinggi hanya akan menambah lapisan krisis yang datang dari penurunan pendapatan. Harapan yang masih ada hanya pada hasil ternak, meskipun sebelum diberlakukannya new normal, kejatuhan harga juga tak terhindari. Sementara itu, bagi pengusaha kecil menengah yang mencoba merambah ekspor, justeru ekspansi pasarnya telah menyeret pada keterpurukan yang lebih dalam, seperti pada cerita ekspor selai nenas di Ngancar. Bahkan ketika petani sekaligus menduduki posisi sebagai perantara dalam rantai distribusi, semisal sebagai kontraktor benih jagung atau pedagang pengepul di pasaran nanas, rente yang biasa dengan mudah diraih, terbukti bisa lenyap begitu saja di masa pandemi. Ironisnya, bagi korporasi besar pengeksport benih, dukungan kebijakan pemerintah secara langsung sudah melapangkan jalan resiliensi. Bahkan dalam kasus PT BISI, penguasaan pasar domestik sekaligus ekspor tambah memperkuat posisi pasar korporasi benih ini.

Beberapa fakta temuan yang dibahas ini menunjukkan kondisi yang sama sekali berbeda dengan temuan BIRTHAL et al (2005) yang menganjurkan

integrasi vertikal usaha tani kecil ke korporasi melalui contract farming sebagai upaya memperkuat usaha tani kecil. Terbukti dari pengalaman petani jagung Kediri, munculnya korporasi benih diiringi oleh kemunculan para pedagang perantara yang menerapkan contract farming pada petani, sehingga tercipta rantai pasok yang panjang dari korporasi ke petani. Alih-alih menguatkan, ketika korporasi menurunkan volume produksi atau ketika perantara kalah bersaing mendapatkan order, petani dengan sendirinya pun terhenti produksinya. Dengan demikian, ketergantungan petani pada pasar yang dimonopoli oleh korporasi telah menyebabkan petani berada dalam posisi yang sangat rentan. Jika saja tidak ada diversifikasi pasar untuk jagung, maka usaha tani kecil di Kediri akan hancur terjerat monocropping dan monopoli pasar korporasi.

Selain itu, dari cerita petani jagung maupun nanas di Kediri, seni bertani yang menyeimbangkan asupan tenaga kerja dengan kembali ke tenaga kerja keluarga (van der Ploeg 2020), juga keseimbangan yang didapat melalui peragaman usaha tani petani, ditambah dengan aktivitas nafkah yang bermacam-macam, menunjukkan bahwa ketika usaha tani kecil tidak sepenuhnya masuk ke dalam rantai bisnis korporasi, sehingga bisa memiliki pasar yang beragam, petani memiliki daya tawar yang lebih baik. Dengan begitu, guncangan yang muncul dari kondisi pandemi, pada umumnya bisa diatasi sementara oleh petani usaha kecil dan menengah. Namun demikian, kajian ini juga memperlihatkan pihak-pihak yang paling rentan. Rantai pasok ekspor terlihat sangat memperlemah buruh tani dan pengusaha kecil. Ketika petani tidak memiliki akses pada tanah atau menguasai tanah tapi minim akses pada permodalan dan hanya mengandalkan kerja upahan sebagai buruh serabutan, terhentinya produksi komoditi ekspor sama dengan terhentinya sumber nafkah mereka.

Keberagaman kondisi usaha tani kecil digambarkan oleh Arias et al (2013) ditentukan oleh akses usaha tani kecil pada aset, seperti tanah/sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan subsistensinya. Ada atau tidaknya akses tersebut akan sangat menentukan kemampuan petani dan kemauannya untuk meningkatkan produksi yang ditujukan untuk pasar. Maka menjadi sangat masuk akal, ketika akses petani di Kediri terhadap tanah sangat rentan karena tergantung pada alokasi lahan yang ditentukan oleh Perhutani, hanya petani bermodal yang mampu menarik keuntungan dari kondisi kerentanan itu. Pasalnya, penguasaan atas modal menjadi faktor

penentu utama, ketika tanah tidak bisa diperlakukan sepenuhnya sebagai aset mutlak. Sementara itu, tenaga kerja dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Buktinya, faktor terakhir ini yang pertama-tama dilepas ketika petani menghadapi guncangan. Itu sebabnya, buruh tani adalah golongan yang paling dilemahkan.

4

KEBIJAKAN PERTANIAN/PANGAN DAN IMPLIKASINYA SEMASA PANDEMI COVID 19

Iwan Nurdin & Laksmi A. Savitri

Tidak ada yang menyangka tahun 2020 dunia seolah dibuat terhenti oleh pandemic Covid-19 yang berawal dari Wuhan, RRC. Virus tersebut seolah membuat deglobalisasi ekonomi di bidang perdagangan dan jasa sepanjang tahun dan belum dapat diprediksi berakhir secara pasti.

Gejala deglobalisasi perdagangan sendiri sebenarnya telah terjadi beberapa tahun sebelumnya khususnya akibat perang dagang antara China dan AS. Namun, semangat proteksionisme ekonomi, atau sekurang-kurangnya perubahan besar-besaran rantai pasok industri yang lebih menekankan pada kemandirian domestik/regional ketimbang lintas benua diperkirakan akan semakin menguat akibat pandemi ini. Salah satu pelajaran dari pandemi ini telah mengemukakan pandangan bahwa rantai

pasok global ternyata sangat rentan disabotase oleh wabah penyakit yang menyebar secara global. Padahal, prediksi bahwa akan terjadi kembali wabah di masa yang akan datang serupa dengan Covid-19 banyak dikemukakan.

Wabah yang mengguncang dunia pada dekade paling modern ini sebenarnya telah terjadi sebelumnya meskipun tidak sebesar Covid-19. Sebelum badai pandemi Covid-19, beberapa wabah yang juga menyeruak, seperti SARS (2002-2003), H1N1 (2009), MERS (2011), dan Ebola (2014-2016). Keseluruhan wabah tersebut berasal dari mutasi penyakit yang sebelumnya berasal dari hewan namun kemudian menjadi menular kepada manusia. Relasi pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi tanpa batas alam dan hewan adalah penyebab utama masalah ini. Alih-alih berubah, sistem ekonomi dunia yang kejam kepada alam dan lingkungan masih akan terus berlanjut. Itulah sebabnya, wabah Covid-19 bukanlah yang terakhir.

Dengan demikian, pemikiran perubahan-perubahan rantai pasok industri salah satunya akibat disrupsi penyebaran wabah global akan semakin mengemuka di masa depan. Namun, apakah perubahan tersebut membawa dampak yang baik bagi masyarakat lokal dan lingkungan dan apakah perubahan tersebut akan mendorong kembali penguatan wacana tentang kemandirian ekonomi wilayah sebagai sebuah kebutuhan?

KEBIJAKAN PANGAN DAN PERTANIAN NASIONAL DI TENGAH COVID-19

Ketika membicarakan rantai pasok dunia industri, banyak yang luput melihat bahwa pangan kita adalah bagian dari rantai pasok perdagangan global. Pangan sudah lama menjadi barang komoditas perdagangan global. Apa yang dihasilkan oleh petani sawit, kopi dan kakao di pelosok Indonesia, peternak modern di Australia atau petani padi di Thailand adalah bagian dari rezim pangan yang menjalankan perdagangan di berbagai belahan dunia. Pangan yang kita konsumsi sehari-hari saat ini adalah suatu rantai komoditas dimulai dari produksi, sirkulasi, konsumsi dari berbagai pelosok bumi. Sebuah perjalanan panjang hingga dapat tersaji. Bahkan, hanya sebagian kecil saja, masyarakat Indonesia saat ini, yang makanannya berasal dari hasil produksi sendiri.

Tentu saja, akibat pandemi ini, yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan rantai pasok yang telah ada berdampak kepada petani dan nelayan dalam skala domestik, regional dan global. Para petani pangan dan sayuran dilaporkan mengalami gangguan (disrupsi) akibat lemahnya serapan pasar dan jaringan distribusi logistik yang terganggu. Sementara, petani dan nelayan yang memasok pangan segar untuk ekspor atau sebagai bahan baku industri seperti sawit, kopi dan kakao juga dilaporkan mengalami gangguan yang cukup dalam.

Selain dari sisi produsen, Indonesia adalah negara yang sepanjang tahun membutuhkan pasokan impor pangan khususnya beras, kedelai, gandum, setiap tahun dalam jumlah dan nilai yang besar. Total impor pertanian Indonesia untuk empat subsektor: pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dari Januari 2019 s/d february 2020 mencapai 17.231 miliar dollar. Kontribusi terbesar dari tanaman pangan mencapai (47,280%), perkebunan (28,774%), hortikultura (15,816%) dan peternakan (8.130%). Dari data ini kita bisa melihat bahwa menjelang merebaknya wabah Covid-19 di tanah air, bangunan struktur pangan yang bergantung kepada impor pangan telah lama terbentuk. Sehingga selama pandemi tentu mengalami gangguan dan mengancam ketersediaan dan harga pangan yang terjangkau (Felippa Amanta & Ira Aprilianti: 2020).

DARURAT KESEHATAN

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa wabah Covid-19 telah menyerang Indonesia. Pengumuman ini mengkonfirmasi keyakinan sebelumnya bahwa Covid-19 sebenarnya telah memasuki Indonesia beberapa bulan sebelumnya sebelum pengumuman resmi tersebut. Mengingat negara-negara tetangga telah terkena wabah ini.

Situasi darurat kesehatan mulai diberlakukan. Pada 13 Maret 2020, pemerintah mengumumkan pembentukan Satgas Penanggulangan Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam Kepres ini pemerintah menegaskan bahwa Satgas Covi-19 berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Secara kelembagaan, satgas yang dibentuk berada dalam lingkup BNPB dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan lain seperti Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan pemerintah Daerah. Gugus tugas ini dibentuk dari tingkat pusat hingga kabupaten. Dalam Kepres ini, Kepala BNPB Letjen. Doni Monardo ditunjuk sebagai kepala pelaksana gugus tugas ini, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Kepala Dewan Pengarah ditunjuk sebagai Kepala Dewan Pengarah (www.covid19.go.id: 2020).

Sejak awal, meski pemerintah menyatakan bahwa kebijakan selama pandemi mengutamakan penanggulangan wabah sebagai prioritas, namun pada sisi praktik, nampaknya kebijakan kesehatan harus banyak dikalahkan oleh kebijakan ekonomi. Bahkan, pada awalnya Satgas Covid-19 tidak menerapkan kebijakan pengendalian penularan pandemi melalui pelaksanaan lockdown akibat kurang mendapat dukungan politik pemerintah (Disantara: 2020).

Pada 20 Maret 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini pada yang intinya memuat permintaan agar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan. Proses realokasi kegiatan tersebut melalui mekanisme revisi anggaran kepada Menteri Keuangan.

Tidak berhenti di situ, pada 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan sekaligus. Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Lahirnya beberapa kebijakan di bulan Maret 2020 yang cukup banyak tersebut menandakan bahwa sejak fase darurat sekalipun, kebijakan meski lebih menekankan penanggulangan pandemi tetap saja

berdampingan dengan praktik penyelamatan ekonomi. Perppu ini juga mendapatkan kritik dari kalangan masyarakat sipil yang menganggap besarnya diskresi penggunaan anggaran dari sisi pemerintah dalam penanggulangan pandemi berpotensi terdapat penyalahgunaan wewenang. Apalagi, berdasarkan Perppu tersebut aparat pemerintah tidak dapat digugat kemudian hari atas kebijakan darurat tersebut. Meski demikian, Perppu ini tetap disahkan DPR pada 12 Mei 2020. (www.hukumonline.com: 2020).

Di lain pihak, kelahiran PP tentang PSBB menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memilih menerapkan kebijakan *lock down*. Dalam kebijakan PSBB memberi kewenangan Pemda menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Sejumlah kritik disampaikan, sebab kebijakan kedaruratan menjadi lebih birokratis karena mekanisme menerapkan kebijakan PSBB setelah Pemda melakukan sejumlah assesment situasi Covid-19 dan kemudian mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat persetujuan menerapkan PSBB. Setelah mendapat persetujuan Menkes, maka Pemda baru dapat menerapkan PSBB.

Selain itu, praktik penerapan PSBB, sebuah istilah yang baru dan berbeda dengan karantina wilayah, telah memperkecil tanggung jawab pemerintah pusat dalam memenuhi hak-hak warga negara khususnya kebutuhan dasar selama masa pemberlakuan PSBB karena menjadi tanggung jawab Pemda.

Simpang siur tentang tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar selama pemberlakuan PSBB telah menyebabkan munculnya gerakan swadaya masyarakat yang di media sosial diberi tagar *#rakyatbanturakyat*. Gerakan ini selain berakar dari jiwa sosial masyarakat, juga merupakan kritik atas lambannya pemerintah. Pemberlakuan PSBB pertama sekali diberlakukan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020.

Memasuki April, pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Dalam perubahan anggaran tersebut, kebijakan berupa paket bantuan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha khususnya UMKM yang mengalami

stagnasi akibat merebaknya pandemi diumumkan akan digelontorkan untuk tahun 2020.

Dalam keterangannya, pemerintah menyatakan tengah menyiapkan paket bantuan bidang sosial senilai Rp. 110 triliun kepada masyarakat miskin yang terdampak akibat pandemic covid. Bantuan tersebut berupa dukungan logistik kebutuhan sembako, bantuan pembayaran listrik, kartu pra kerja yang tujuannya menolong sisi pengeluaran masyarakat akibat pendapatan masyarakat yang jatuh.

Lagi-lagi, beberapa kebijakan tersebut mendapat sorotan sebab dikritik mengatasnamakan pandemi namun tidak langsung dinikmati rakyat. Sebagai misal, kartu prakerja yang sebelumnya dianggap sebagai bantuan langsung kepada pencari kerja dalam praktiknya adalah bantuan pembiayaan kursus kepada para pencari kerja. Sehingga, dana yang digelontorkan sesungguhnya lebih banyak mengalir kepada perusahaan penyelenggara dan provider yang ditunjuk pemerintah kursus yang merupakan anak usaha group perusahaan besar.

KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN

Jika tenaga Kesehatan adalah ujung tombak terdepan dalam penanggulangan Covid-19, petani adalah pertahanan yang menyediakan pangan selama darurat kesehatan. Namun, pembahasan pangan selama covid lebih banyak membahas tentang bantuan pangan berupa beras dan tidak banyak menyentuh pembelian harga-harga hasil pertanian dari petani yang jatuh akibat pemberlakuan PSBB.

Skema Insentif Petani dan Nelayan

Selama April 2020, Presiden Jokowi tercatat dua kali membahas persoalan pangan. Pertama, pada Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden dengan tajuk Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok melalui video conference. Dalam rapat tersebut, Presiden mendapatkan sinyal tentang kemungkinan melemahnya stok bahan pangan. Pasalnya, FAO telah mengingatkan ancaman krisis pangan akibat pandemi. Kedua ketika menyampaikan

pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 melalui video conference bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah serta para kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Setelah sebulan sebelumnya membahas ketersediaan pangan, pada akhir Mei 2020 barulah Presiden Jokowi membuat sebuah kebijakan khusus untuk petani dan nelayan. Sebelumnya, telah banyak diberitakan tentang jatuhnya harga-harga yang dialami oleh petani. Presiden kemudian memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Intensif bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dari Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/5/2020).

EMPAT SKEMA INSENTIF BAGI PETANI DAN NELAYAN
UNTUK JAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK

1. "Melalui program **jangking** pengaman sosial bagi **2,7 petani dan buruh tani miskin, dan 1 juta nelayan dan petambak miskin**. Baik itu PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Paket Sembako, dan Program Gratis Subsidi Listrik."
2. "Kita putuskan dan sudah berjalan, **Pemerintah menyiapkan Rp34 triliun:**
 - Merelaksasi pembayaran **angsuran dan subsidi bunga kredit** yang disalurkan lewat KUR, Mekaar, UMI, Pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya.
 - **Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan** yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPM UKP, CPCL, dan lain-lainnya."
3. "Stimulus untuk modal kerja:
 - Bagi petani dan nelayan **yang bankable** penyalurannya melalui **perluasan program KUR** ini bisa.
 - Yang tidak **bankable** penyalurannya bisa lewat **UMI, Mekaar, dan skema lain** melalui kementerian."
4. "Instrumen **bantuan non-fiskal**, kebijakan kelancaran *supply chain*: **ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi.**"

Gambar 7. Skema Insentif Petani dan Nelayan (Sumber: setneg.go.id)

Skema khusus yang diberi nama Insentif untuk petani dan nelayan disiapkan pemerintah melalui program jaring pengaman sosial, di mana akan dipastikan sebanyak 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta

nelayan dan petambak masuk dalam program bantuan sosial yang diadakan. Program sosial yang dimaksud itu berupa PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.

Insentif yang kedua, melalui program subsidi bunga kredit yang juga sudah diputuskan dan sudah berjalan. Insentif ketiga yakni pemberian stimulus untuk modal kerja yang dinilai penting bagi usaha pertanian, usaha kelautan, dan perikanan. Kemudian insentif keempat melalui instrumen kebijakan nonfiscal melalui kebijakan kelancaran supply chain sehingga usaha pertanian dan perikanan mendapatkan ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi.

Food Estate di Kalimantan Tengah

Ancaman krisis pangan yang digidengungkan oleh FAO nampaknya menjadi jalan untuk masuknya proyek pembangunan lahan pertanian pangan skala luas (food estate) pada eks proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dalam pembahasan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah telah menambahkan satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan food estate.

Sebenarnya proyek food estate bukanlah hal baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan sebelumnya, proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dilaksanakan di Papua. Proyek pembangunan kebun pangan ini mengalami kegagalan, namun telah membuat pelepasan kawasan hutan yang maha luas kepada sejumlah perusahaan atas nama proyek pangan.

Dalam perencanaannya, berbeda dengan MIFEE yang didorong swasta, food estate di Kalimantan Tengah merupakan program ekstensifikasi lahan padi yang dimotori oleh proyek pemerintah. Sementara, sebagian besar lahan proyek ini adalah eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di era Orde Baru. Hal ini mengkhawatirkan, sebab pertanian padi di areal eks gambut telah diujicoba bertahun-tahun, hasilnya adalah pertanian pangan berbiaya mahal. Dengan demikian, program lumbung pangan nasional yang tengah disiapkan pemerintah belum mengarah kepada model pembangunan pangan baru yang memberi jalan terwujudnya kedaulatan pangan. Namun dalam perjalanannya, beberapa investor dari luar negeri telah diundang

untuk berinvestasi di Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.

Kebijakan Kementerian Pertanian

Sebenarnya, beberapa kebijakan kementerian yang khusus yang dirancang selama penanganan pandemi covid-19 mengikuti pada kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh Presiden. Sehingga, kebijakan teknis seperti Permentan No.16/2020 tentang Penyediaan Dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 Melalui Anjungan Tunai Mandiri Beras (ATM Beras) sesungguhnya adalah turunan dari insentif yang telah diulas sebelumnya. Namun, kebijakan ATM beras ini ditempatkan kementan di Komando Distrik Militer (KODIM) dan beras yang disediakan medium dan premium.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Kementan adalah operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, bantuan penyerapan gabah dan transportasi/angkutan distribusi pangan, dan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Kementan juga bekerjasama bermitra dengan Gojek dalam distribusi bahan pokok secara daring melalui Toko Tani Indonesia.

Program yang dilakukan meliputi hulu-hilir yang dimulai dari bantuan benih pangan, hortikultura dan perkebunan, bantuan pangan dan penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan fasilitasi bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Sedangkan pada sektor pertanahan, Kementerian ATR/BPN-RI mengeluarkan Keputusan Menteri ATR/BPN No. 88/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas Tanah, dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang Telah atau Akan Berakhir pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease (COVID-19). Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang telah atau akan berakhir jangka waktunya pada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, diberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Omnibus Law UU Cipta Kerja

Pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan usulan RUU yang berasal dari inisiatif pemerintah yakni Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pengesahan ini memantik kritik dan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, sebab selain proses pembahasan yang tidak banyak melibatkan publik akibat pembatasan sosial selama pandemi, RUU ini juga secara substansial telah mengubah berbagai UU dan memberi karpet merah kepada investor secara berlebihan.

Pada sisi pertanian dan pangan, pengesahan UU Cipta Kerja telah membuat potensi impor pangan semakin luas terjadi. Sebab, UU Cipta Kerja telah merubah Pasal UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU Pangan, sbb:

- Pasal 32 angka 2 mengubah pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 30

- (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.
 - (2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 68 angka 2 mengubah pasal 14 UU Pangan, sbb:

Pasal 14 UU Pangan

- (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:
 - a. Produksi Pangan dalam negeri;
 - b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau
 - c. Impor.
- (2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tarif.

Lantaran perubahan pasal tersebut, impor tidak lagi menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, melainkan menjadi salah satu sumber penyediaan pangan yang setara.

Sebenarnya, melalui beleid baru ini sistem pangan Indonesia akan menjadi terintegrasi langsung dengan sistem pangan dunia. Sebuah integrasi ketergantungan pada pihak Indonesia. Dengan pengesahan UU Cipta Kerja ini, konsep kedaulatan pangan semakin jauh dari yang dicita-citakan. Secara nasional, Indonesia memang negara yang setiap tahun masih melakukan impor pangan dalam jumlah besar, seperti komoditi-komoditi bawang putih 196 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula pasir 670 ribu ton, dan gandum mencapai lebih dari 10 juta ton per tahun, (per Mei 2020). Namun, jebakan impor pangan tersebut alih-alih diselesaikan justru memperlebar peluang ketergantungan terhadap impor pangan.

Selain mempermudah impor pangan UU Cipta Kerja mengutamakan pengalokasian tanah kepada investor. Dalam usaha meredam sejumlah protes dan perlawanan yang meluas terhadap UU ini, pemerintah mensosialisasikan bahwa UU Cipta Kerja mendukung reforma agraria. Dalam pasal 126 UU Cipta Kerja disebutkan: (1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria. (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Benarkah UU ini mendukung pelaksanaan reforma agraria? Sebenarnya, UU ini secara mendasar telah keliru menempatkan reforma agraria sebagaimana Pasal 126 tersebut. Sebab, Reforma Agraria dimaksudkan sebagai sebuah operasi koreksi atas ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah. Sementara pasal ini telah mendudukan reforma agraria selain bukan sebagai langkah koreksi juga menjadikannya sebagai operasi pengadaan tanah. Tentu ada perbedaan mendasar. Sebagai langkah koreksi ia bekerja atas dasar prinsip penertiban tanah yang timpang dan penyelesaian konflik. Sementara pengadaan tanah adalah operasi keperdataan dengan cara pembelian atau proses ganti kerugian.

Dengan menjadikan RA sebagai operasi pengadaan tanah, maka tanah yang seharusnya objek Reforma Agraria menjadi objek pengadaan tanah setelah dibeli atau diganti rugi oleh Bank Tanah. Sehingga, bisa saja dengan dalih reforma agraria, dalam praktiknya menjadi operasi penyelamatan bagi para penelantar tanah atau pemilik HGU, HGB dan Hak Pakai yg habis jangka waktunya.

Selain itu, terjadi penyempitan hak rakyat atas tanah objek reforma agraria. Dengan menyatakan bahwa sedikitnya 30 persen Tanah Negara yang diperuntukkan kepada Bank Tanah dijadikan objek reforma agraria sebenarnya berpotensi besar memangkas hak masyarakat. Misalnya, dalam aturan pendayagunaan tanah terlantar, tanah negara untuk reforma agraria paling sedikit 80 persen dari tanah yang diterlantarkan. Karena itu, tidaklah tepat jika menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengakomodir tuntutan keadilan agrarian dengan mencatumkan reforma agraria. Justru UU ini membuat jalan reforma agraria dalam tafsir keliru dan salah kaprah pada sisi pelaksanaan.

Bisa dikatakan bahwa istilah reforma agraria dalam UU ini hanyalah pemanis semata, namun pil pahit bagi masyarakat. Karena, pengaturan lainnya dalam UU ini terkait dengan pengadaan tanah bagi proyek-proyek bisnis atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, yang berpotensi menggusur hak-hak rakyat diberi jalan kemudahan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PADA RESILIENSI PETANI KEDIRI

Beberapa kebijakan terkait pangan dan pertanian semasa pandemi yang diundangkan tersebut, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dirasakan membantu kehidupan petani di Kediri. Secara umum, para petani Kediri yang diwawancarai mengaku telah mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Ketentuan di desa adalah mereka yang menerima merupakan warga desa yang belum menerima jenis bantuan apa pun.

Selain bansos yang merupakan bantuan umum, bantuan khusus dalam bentuk skema insentif petani dan nelayan seperti disampaikan oleh

Presiden Jokowi belum dinikmati. Kebijakan non-fiskal seperti kemudahan akses pada sarana produksi pertanian, seperti pupuk bersubsidi, malah menjadi persoalan besar bagi petani Kediri. Pupuk bersubsidi tidak tersedia, sementara pupuk non-subsidi harganya melonjak berkali lipat. Di sisi lain, kebijakan kelancaran rantai pasok pun tidak terlihat ada intervensi negara langsung, kecuali pemberlakuan new normal yang memungkinkan perputaran logistik lebih lancar dibandingkan PSBB. Sayangnya, hal ini tidak serta-merta berdampak pada perbaikan pendapatan petani, karena harga komoditi nanas dan jagung yang anjlok tidak lalu pulih seketika, terutama bagi pengusaha ekspor skala kecil dan petani skala luas dan menengah yang terpaksa membiarkan hasil panennya membusuk.

Di samping dampaknya pada rantai pasok yang merugikan petani, pendidikan anak yang harus berlangsung secara daring ternyata menjadi tambahan pengeluaran yang tak terduga dan dirasakan sangat berat. Seperti buah simalakama, jika dipenuhi biaya tak ada, tak terpenuhi anak tak sekolah. Hal ini dirasakan menjadi beban berat terutama bagi buruh/buruh tani yang kehilangan pekerjaan semasa pandemi ini. Dengan situasi penurunan penghasilan dan sedikitnya pilihan untuk menambah pendapatan melalui kerja upahan, maka petani yang terikat pada rantai ekspor menjadi semakin terpuruk. Sisi positif dari berkembangnya pasar lokal untuk nanas dan jagung di Kediri adalah masih terbukanya kemungkinan bagi petani untuk tetap menyelamatkan pendapatan dari hasil panen, walaupun pangsa pasarnya tetap berada dalam kompetisi yang sangat ketat.

Pengalaman petani Kediri jelas menggambarkan bahwa apa-apa kebijakan nasional yang ditujukan pada petani, tidak secara langsung dirasakan dampaknya bagi petani. Pada akhirnya, cara-cara bertahan hidup (resiliensi) keluarga-keluarga petani kecil dan buruh tani semasa pandemi ini, khususnya di Kediri, lebih banyak ditentukan oleh jejaring sosial, peluang pasar dan skala usaha ketimbang oleh intervensi kebijakan negara. UU Cipta Kerja yang tidak memberi jalan yang jelas bagi reforma agraria pastinya bukan jawaban dari masalah akses terhadap tanah bagi petani Kediri yang berada di Kawasan Perhutani. Sebaliknya, kondisi pasar ke depan akan menjadi tantangan besar bagi petani Kediri karena kran impor terbuka lebar dan kemampuan produksi komoditi hanya akan ditentukan oleh kemampuan memenangkan persaingan harga.

5

EKSPOR PANGAN BERNILAI TINGGI DAN PANDEMI: MERENTANKAN YANG RENTAN

Sejak awal, pandemi virus ini sebenarnya telah memperlihatkan bahwa kemandirian sebuah negara menjadi kekuatan penuh dalam melawan wabah dan segala akibat ekonominya yang tidak terprediksi sebelumnya. Bahkan, selama pandemi organisasi internasional baik regional maupun global, seperti ASEAN, UNI EROPA, OKI, yang pernah dibangun ternyata tergapag-gagap dalam menjalankan reaksi dan tindakan bersama terhadap wabah ini. Semua pada akhirnya kembali ke negara masing-masing dengan kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda.

Pandemi virus ini memukul sangat keras pada negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, seperti halnya di Indonesia. Keharusan menjalankan roda ekonomi untuk mencegah krisis meluas di tengah ketimpangan, akhirnya berdampak pada sulitnya upaya pencegahan

hingga penghentian penyebaran penyakit baru ini. Ini disebabkan oleh tata cara jaga jarak sosial hingga PSBB berakibat besar dan berbeda pada lapisan masyarakat miskin. Golongan miskin tidak bisa berhenti bekerja agar tak kelaparan, sementara itu, proses produksi makanan yang berlangsung di pedesaan tetap harus terus berjalan dan dijalankan oleh para petani kecil, buruh tani dan ragam usaha kecil. Kesemuanya yang disebut terakhir ini kerap masuk dalam golongan miskin pedesaan.

Dalam konteks kendala yang diakibatkan pandemi dan ketimpangan yang bahkan sudah diakui Bank Dunia terjadi di Indonesia tersebut (World Bank 2015, Oxfam 2017), kajian awal tentang usaha tani petani Kediri yang masuk ke dalam rantai ekspor dan kondisinya di kala pandemi ini menemukan bahwa:

1. Tanpa perdagangan ekspor pun, kombinasi antara kerentanan akses pada tanah dan kerentanan petani akibat lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai yang dikuasai bisnis korporasi (hulu-hilir), sudah mendudukkan petani kecil di posisi terlemah dari keseluruhan rantai pasok pangan
2. Rantai pasok ekspor berbasis bisnis korporat memposisikan buruh tani dan usaha kecil dalam pasar monopsoni yang mengakibatkan kehancuran di tingkat petani dan buruh tani kehilangan pekerjaan, ketika daya beli anjlok dan jalur logistik terhambat di masa pandemi.
3. Kebijakan pertanian yang mendorong ekspor hanya dinikmati oleh korporasi agribisnis yang juga menguasai pasar domestik, karena ketika hambatan logistik untuk mentransportasikan komoditi jarak jauh dan lama menjadi mahal, hanya bisnis korporat yang bisa mengalihkan biaya logistik menjadi harga yang harus dibayar oleh konsumen.
4. Kebijakan pertanian dan pangan semasa pandemi tidak mengintervensi resiliensi petani kecil secara berarti. Kemampuan meraih peluang di pasar lokal, skala usaha yang fleksibel dan jejaring sosial, lebih menentukan cara-cara petani dan buruh tani untuk bertahan hidup ketimbang kebijakan bantuan dari negara.

Belajar dari temuan-temuan tersebut, terbukti bahwa masuknya Indonesia dalam rezim pangan global dengan kepatuhannya pada keharusan berpartisipasi dan mengikuti aturan main perdagangan internasional, telah mendudukkan golongan yang sudah rentan, yaitu: petani kecil, buruh tani dan usaha kecil pada posisi kondisi yang paling rentan dalam rantai pasok

global. Dengan demikian, kondisi pandemi memperlihatkan secara benderang bahwa rezim pangan internasional semakin menundukkan negara Indonesia pada hukum pasar bebas, yaitu: merentankan mereka yang rentan dan menimpangkan ketimpangan menjadi semakin dalam.

Daftar Pustaka

- Arias, P, D. Hallam, E. Krivonos, and J. Morrison. 2013. Smallholder integration in changing food markets. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome
- Bernstein, H. 2019. Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria. Insist Pres: Yogyakarta.
- Birthal, PS, P, Joshi dan A. Gulati. 2005. Vertical Coordination in High-Value Commodities: Implications for Small-holders. MTID Discussion paper No. 85. IFPRI
- Dwi Intan, Fitriani (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Terhadap Buah Nanas Varietas Smooth Cayenne (Studi Kasus: Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
- Disantara, FP. 2020. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 48 Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/index>
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19

- Felippa, A. dan I. Aprilianti. 2020. "Kebijakan Perdagangan Pangan Indonesia saat Covid-19." Center for Indonesian Policy Studies, 2020, doi:10.35497/309123.
- Friedmann, H, dan P. McMichael. 1989. Agriculture and the state system: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologia Ruralis* 29, no. 2: 93–117.
- Goodman, D and M. Watts. 1997. *Globalising Food Agrarian Questions and Global Restructuring*. Routldge: London New York
- Julaiddin, J., & Sari, H. (2020). Kebijakan hukum di tengah penanganan wabah corona virus disease (covid-19). *UNES Law Review*, 2(4), 358-371. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123>
- Mareta, YPM. 2017. Analisis rantai nilai komoditas nanas madu di Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang. Skripsi. Universitas Diponegoro
- McMichael, P. 2020. *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. Insist Press:Yogyakarta
- Rahayu,S. 2018. Analisis Pemasaran Komoditas Nanas Berbasis Structure Conduct Performance (SCP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Skripsi. Universitas Jember.
- Susanto, M., T. Asmara. 2020. *Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
- Van der Ploeg, JD. 2019. *Seni Bertani Chayanovian Manofesto*. Insist Press:Yogyakarta
- Weinberger, K dan TA Lumpkin. 2005. High value agricultural products in Asia and the Pacific for small-holder farmers: Trends, opportunities and research priorities. Workshop paper "How Can the Poor Benefit from the Growing Markets for High Value Agricultural Products". October 3-5, 2005.CIAT, Cali, Colombia